



**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
(LAKIP)**

**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN LUWU TIMUR**

TAHUN 2022

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
KATA PENGANTAR	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
BAB II PERENCANAAN KINERJA	7
2.1. Rencana Strategis	7
a. Visi dan Misi	7
b. Tujuan Strategis	8
c. Sasaran Strategis	9
d. Indikator Kinerja Utama	9
2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2022	11
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	32
3.1. Capaian Kinerja Tahun 2022	32
3.2. Realisasi Anggaran	66
BAB IV PENUTUP	94
LAMPIRAN	

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang atas karunia dan kekuasaannya kami dapat menyajikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2022 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur. Laporan ini menyajikan uraian penjelasan tentang capaian sasaran, program dan kegiatan serta Sub kegiatan yang telah kami laksanakan dan disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban secara nyata untuk menuju terciptanya kondisi yang tertib, aman, damai dan dinamis sehingga dapat mewujudkan ***"Luwu Timur Yang Berkelanjutan dan Lebih Maju berlandaskan nilai agama dan budaya"***.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur pada Tahun Anggaran 2022. Disamping sebagai bentuk pertanggungjawaban, laporan ini juga berfungsi sebagai sarana evaluasi atas pencapaian kinerja oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur serta sebagai bahan untuk koreksi kegiatan yang tercantum pada rencana strategis selama 5 (lima) tahun yaitu Tahun 2021-2026.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2022 masih banyak kelemahan dan jauh dari sempurna sehingga kami perlu saran dan koreksi dari semua pihak. Namun demikian besar harapan kami kiranya laporan ini dapat bermanfaat dan menjadi bahan dan pertimbangan lebih lanjut dari pimpinan.

Makassar, Januari 2023
Kepala Satuan

INDRA FAWZY, S.IP., M.Si.
Pangkat: Pembina Utama Muda
NIP. 19701103 199003 1 002

BAB I

PENDAHULUAN

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan masing-masing Instansi.

Pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur tahun 2022 disampaikan dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja yang merupakan laporan dalam mencapai tujuan sasaran strategis yang telah ditetapkan pada dokumen perencanaan, dan merupakan sarana untuk evaluasi atas pencapaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur, sehingga dapat dilakukan perbaikan dan peningkatan kinerja di masa yang akan datang.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja, atau Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (*good governance*) di Indonesia.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur mempunyai maksud dan tujuan sebagai berikut:

Maksud

- a. Memberikan informasi dan pertanggungjawaban kinerja yang terukur secara tertulis kepada Bupati Luwu Timur atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur.
- b. Memberikan gambaran mengenai tingkat capaian kinerja dalam rangka mewujudkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur visi dan misi Bupati Luwu Timur serta tujuan dan sasaran kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
- c. Sebagai sarana informasi tentang pelaksanaan prinsip-prinsip good governance.

Sebagai salah satu bahan penilaian evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

Tujuan

Adapun tujuan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 adalah:

Adapun tujuan penyusunan Laporan evaluasi Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur Triwulan II Tahun 2022 adalah:

- a. Mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur.
- b. Melakukan perbaikan berkesinambungan untuk peningkatan kinerja instansi dalam pelaksanaan program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur.
- c. Menerapkan fungsi manajemen kinerja yang baik dan benar di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur.
- d. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur di dalam pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

1.1. Data Umum Perangkat Daerah

1. Data Kepegawaian

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur merupakan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat khususnya sub urusan ketentraman dan ketertiban umum dan sub urusan kebakaran. berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat merupakan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, sehingga dalam penyelenggaraan urusan tersebut Satpol PP memiliki peran penting dan strategis serta mengampu Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang wajib dipenuhi Pemerintah Daerah dalam menjalankan Pemerintahan.

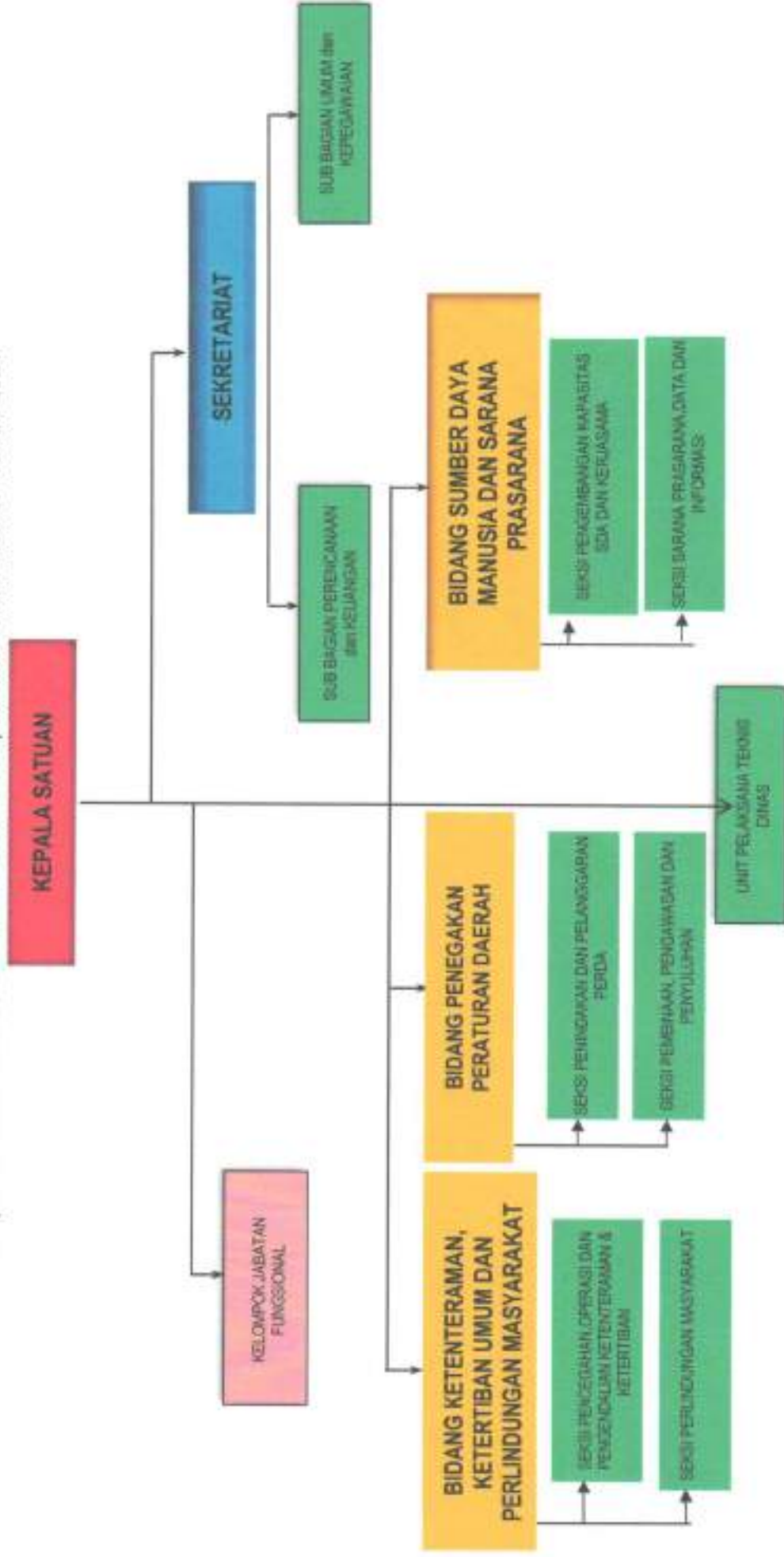
Berdasarkan Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, penjabaran dari ketentuan tersebut telah terbit Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Sebagai salah satu unit kerja yang melaksanakan tugas Bupati dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, serta menegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati.

STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur, susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja d Kabupaten Luwu Timur dapat dilihat pada bagan di bawah ini:

Gambar 1

Bagan Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Luwu Timur berdasarkan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor Tahun 2021



Jumlah PNS dan Non PNS

Pelaksanaan tugas dan fungsi Satpol PP Kabupaten Luwu Timur pada tahun 2022 didukung oleh personil sebanyak 232 orang yang terdiri 39 Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 193 Non-PNS atau tenaga upah jasa. Berikut rincian data personil pada Satpol PP Tahun 2022.

Tabel 1.1
Jumlah Pegawai Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan
Pada Satuan Polisi Pamong Praja
Kab. Luwu Timur Tahun 2022

NO.	GOLONGAN	JUMLAH PEGAWAI KUALIFIKASI PENDIDIKAN												TOTAL	
		S3/S2		S1/DIV		D1-D3		SMA/ SEDERAJAT		SMP/ SEDERAJAT		SD/ SEDERAJAT			
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1	IV	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
2	III	-	-	17	4	-	-	-	-	-	-	-	-	16	4
3	II	-	-	-	-	-	-	10	3	-	-	-	-	10	3
4	CPNSD	-	-	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	HONORER	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	UPAH JASA														
	- BANTUAN SATPOL PP	-	-	13	5	2	3	139	31	-	-	-	-	154	39
	- SOPIR	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
	- CLEANING SERVICE	-	-	-	-	-	-	-	-	1		-	-	1	

Sumber: Satpol PP Kab Luwu Timur

Tabel 1.2
Jumlah Pejabat Struktural/Eselon
berdasarkan Kualifikasi Pendidikan dan Jenis Kelamin
Pada Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022

NO.	PEJABAT STRUKTURAL/ES ELON	JUMLAH PEGAWAI KUALIFIKASI PENDIDIKAN												TOTAL	
		S3/S2		S1/DIV		D1-D3		SLTA/ SEDERAJAT		SMP/ SEDERAJAT		SD/ SEDERAJAT			
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1	II.a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	II.b	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
3	III.a	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
4	III.b	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-
5	IV.a	-	-	5	2	-	-	-	-	-	-	-	-	5	3
6	IV.b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	2	-	7	3	-	-	-	-	-	-	-	-	9	3

Sumber: Satpol PP Kab Luwu Timur

Tabel 1.3
Jumlah Pejabat Fungsional
berdasarkan Kualifikasi Pendidikan dan Jenis Kelamin
Pada Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022

NO.	PEJABAT FUNGSIONAL	JUMLAH PEGAWAI KUALIFIKASI PENDIDIKAN												TOTAL	
		S3/S2		S1/DIV		D1-D3		SLTA/ SEDERAJAT		SMP/ SEDERAJAT		SD/ SEDERAJAT			
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1	Polisi Pamong Praja Pelaksana	-	-	-	-	-	-	3	2	-	-	-	-	3	2
2	Polisi Pamong Praja terampil	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	3	-
3	Polisi Pamong Praja ahli	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
4		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	-	-	1	1	-	-	5	2	-	-	-	-	7	2

Sumber: Satpol PP Kab Luwu Timur

2.1. PERENCANAAN STRATEGIS

Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026 adalah dokumen perencanaan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur yang bersifat taktis strategis dan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dengan memperhitungkan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang ada atau yang mungkin timbul, mengandung visi, misi, dan nilai-nilai, serta faktor penentu keberhasilan tujuan dan sasaran serta disusun dan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Timur. Fungsi Renstra Satpol PP adalah sebagai acuan penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan dalam jangka waktu Lima Tahun, sesuai dengan tugas dan fungsi pokok yang diembannya.

Visi dan Misi Kepala Daerah

Visi, dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Luwu Timur untuk penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan publik pada masa bakti 2021-2026 merupakan keberlanjutan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Visi dan Misi Daerah Kabupaten Luwu Timur sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

VISI

" Luwu Timur Yang Berkelanjutan dan Lebih Maju berlandaskan nilai agama dan budaya".

Artinya melanjutkan pembangunan daerah menuju kabupaten Luwu Timur yang lebih maju, sejahtera dan mandiri melalui pengembangan ekonomi kerakyatan secara terpadu dan berkelanjutan berbasis sumber daya.

MISI

Misi adalah upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan

1. Meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat menyeluruh
2. Mengembangkan ekonomi daerah yang berdaya saing dan berjangkauan luas
3. Menyediakan infrastruktur daerah yang memadai dan lingkungan yang berkualitas
4. Meningkatkan pemerintahan dan pelayanan public yang lebih baik
5. Mewujudkan ketenteraman dan ketertiban bagi seluruh warga masyarakat
6. Menjamin keberlangsungan pembangunan yang berbasis pada agama dan budaya

Dari 6 (enam) Misi tersebut di atas Satuan Polisi Pamong Praja mendukung Misi pada nomor (5) yaitu "mewujudkan ketenteraman dan ketertiban bagi seluruh warga masyarakat". Dalam menjaga Stabilitas Keamanan Wilayah peranan Satpol PP sangatlah penting, hal tersebut disebabkan karena berkaitan erat dengan tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja yaitu menegakkan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati, Menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat. Melalui program/kegiatan/sub kegiatan yang telah direncanakan Satpol PP optimis mampu mendukung untuk mewujudkan Misi Bupati/Wakil Bupati Luwu Timur.

Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang diharapkan dapat menggambarkan hasil akhir yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan akan menggambarkan arah strategi organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin dicapai ke depan dengan lebih mempertajam fokus pelaksanaan misi, sekaligus meletakkan kerangka prioritas untuk lebih memfokuskan arah

semua program dan aktifitas/kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur.

Berdasarkan misi yang telah ditetapkan, maka tujuan perencanaan strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur dirumuskan sebagai berikut:

MEWUJUDKAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT

Sasaran Strategis

Sasaran Strategis merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur sehingga dapat dicapai dalam jangka waktu satu sampai lima tahun. Sasaran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam proses perencanaan dari tujuan yang ditetapkan. Fokus utama dalam penetapan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan organisasi.

Adapun sasaran strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur sesuai dengan Tujuan yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS
1. Meningkatkan Ketenteraman dan ketertiban umum yang mengarah kepada kondisi yang aman dan kondusif	• Meningkatnya kualitas penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum sesuai standar pelayanan minimal
2. Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan layanan urusan perangkat daerah	• Meningkatnya kualitas dan pencapaian Kinerja penyelenggaraan urusan perangkat daerah

Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama (IKU) telah ditetapkan secara formal, sehingga akan diperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik serta diperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian satu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang dipergunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Penetapan IKU secara teknis dirumuskan dengan mengacu indikator-

indikator sasaran yang terdapat pada Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur.

IKU ini merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan untuk menyusun rencana kerja, menyusun rencana kinerja tahunan, menyusun dokumen perjanjian kinerja, evaluasi pencapaian kinerja dan menyusun laporan akuntabilitas kinerja.

Tabel 2.1
Indikator Kinerja Utama (IKU)
Satuan Polisi Pamong Praja

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Formulasi Perhitungan
1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum sesuai standar pelayanan minimal	Persentase penurunan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	%	$\frac{\text{Jumlah (gangguan Trantibum Thn ke n-1) - (jumlah gangguan trantibum tahun ke n)}}{(\text{jumlah gangguan trantibum tahun ke n-1})} \times 100\%$
		Persentase Penurunan Pelanggaran Perda/perkada	%	$\frac{\text{Jumlah (gangguan pelanggaran perda dan perkara tahun n-1) - (jumlah pelanggaran perda dan perkara tahun ke n)}}{(\text{jumlah pelanggaran perda dan perkara tahun n-1})} \times 100\%$
		Persentase standar teknis dan mutu pelayanan dasar SPM Bidang ketenteraman dan ketertiban umum	%	Hasil penjumlahan atas nilai kinerja indicator : 1. persentase SDM aparaturnya terlatih 2. persentase pemenuhan sarana dan prasarana minimal 3. persentase SOP ketenteraman dan ketertiban umum yang telah disusun 4. persentase warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Formulasi Perhitungan
				perda dan perkada Dengan asumsi masing-masing indikator memiliki bobot yang sama 25%
2	Meningkatnya Kualitas dan Pencapaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Program Perangkat daerah	%	Realisasi capaian kinerja program dibagi target/rencana kinerja program dikali 100%

2.2. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2022 berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan bagi aparatur Satpol PP dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelaksanaan pelayanan.

Dokumen Perjanjian Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur menyusun penetapan kinerja setelah menerima Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) TA 2022 .

Dalam melaksanakan Perjanjian Kinerja diperlukan partisipasi, semangat, dan komitmen dari seluruh personil Satpol PP Kab. Luwu Timur, karena akan menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang telah direncanakan. Rencana Strategis menjadi tuntunan dan petunjuk yang memberi arah tujuan dan sasaran pada kegiatan pembangunan untuk mewujudkan visi dan misi yang ingin dicapai.

Perjanjian Kinerja berisi perjanjian kepala OPD dalam hal ini Kepala Satuan Polisi Pamong Praja kepada atasan langsung dalam hal ini Bupati Luwu Timur untuk mewujudkan target kinerja tahun berjalan.

Untuk dapat mengukur keberhasilan implementasi dari rencana strategis Tahun 2022, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur menetapkan target untuk masing-masing kegiatan yang harus dicapai sebagai pelaksanaan dari program, kegiatan dan sub kegiatan. Target ini dituangkan dalam dokumen Penetapan Kinerja (*Performance Plan*) Tahun 2022.

Adapun Penetapan/Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 sebagaimana Tabel 2.3 di bawah ini:

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Tahun 2022
Satuan Polisi Pamong Praja

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	Persentase penurunan pelanggaran Perda/perkada	9,10 %
		Persentase Penurunan gangguan Ketenteraman dan ketertiban Umum	9,10 %
		Persentase Standar teknis dan Mutu Pelayanan dasar SPM Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	66,99 %
2	Meningkatnya Kualitas dan Pencapaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Program Perangkat daerah	100%

Dalam mendukung pencapaian sasaran strategis Satuan Polisi Pamong Praja di atas, masing-masing Bidang berkontribusi melalui perjanjian kinerja dengan Kepala Satuan. Berikut ini perjanjian kinerja masing-masing bidang:

1) Bidang Penegakan Peratuaran Daerah

Bidang Penegakan Perda melaksanakan program peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum dengan 1 (Satu) kegiatan yaitu: 1) Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota dan Peraturan Bupati/ Walikota; Pelaksanaan program/kegiatan tersebut untuk mendukung pencapaian sasaran strategis 1 Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum sesuai Standar Pelayanan Minimal

dengan indikator kinerja utama "**Persentase Penurunan Pelanggaran Perda dan Perkada**" dan Indikator Kinerja Programnya **Persentase Penegakan Perda dan Perkada**".

Dalam rangka pencapaian target kinerja program dan kegiatan tahun 2022, Kepala Bidang Penegakan Perda (Eselon III) telah melakukan perjanjian kinerja dengan Kepala Satpol PP (Eselon II) . Perjanjian Kinerja tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.4
Perubahan Perjanjian Kinerja
Kepala Bidang Penegakan Perda (Eselon III)

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	ANGGARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Meningkatnya Penegakan Perda	Persentase Penegakan Perda	100%	Rp 384.260.164
	- Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota dan Peraturan Bupati/ Walikota	Tertanganinya Perda dan Perkada yang memuat Sanksi	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	100%	Rp 384.260.164

Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Bidang Penegakan Peraturan Daerah terurai menjadi 3 (Tiga) sub kegiatan yang berkontribusi langsung terhadap capaian kinerja program dan kegiatan.

Dalam rangka pencapaian target kinerja sub kegiatan tersebut di atas telah dilakukan perjanjian kinerja antara Kepala Bidang Penegakan Perda (Eselon III) dengan 2 (dua) Kepala Seksi di bawahnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Berikut perjanjian kinerja yang telah dilakukan.

terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati	Kawasan tanpa Rokok(KTR) yang dilaksanakan		
		- Jumlah Pengawasan Peredaran Rokok Ilegal yang dilaksanakan	11 kali	
		- Jumlah Pengawasan potensi pelanggaran Pelaksanaan Perda/Perkada Yang dilaksanakan	20 Kali	

2) Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman melaksanakan 1 (satu) Program yaitu Program Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum. Program tersebut dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis 1 Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Ketentraman Masyarakat dengan indikator kinerja utama ***"Persentase Penurunan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum"*** dan Indikator Kinerja Program ***"persentase Gangguan Ketenterman dan Ketertiban Umum yang dapat diselesaikan"***.

Dalam rangka pencapaian target kinerja program, Kepala Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (Eselon III) telah melakukan perjanjian kinerja dengan Kepala Satpol PP (Eselon II). Perjanjian Kinerja tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.7
Perubahan Perjanjian Kinerja
Kepala Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan
Masyarakat (Eselon III)

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET KINERJA	ANGGARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Terselesainya gangguan trantibum	- Persentase Penurunan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum - Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	9.10% 100%	Rp.5.573.924.600
	- Penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Tertanganinya gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	- Persentase tertib penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum yang ditangani - Persentase Satlinmas Desa/Kelurahan yang aktif	100% 8,59%	Rp.5.573.924.600
1	- Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Tercegahnya gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	- Jumlah Operasi deteksi dini dan cegah dini yang dilaksanakan - Jumlah operasi patroli ketenteraman dan ketertiban umum - Jumlah Pembinaan dan penyuluhan ketenteraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan - Jumlah Pengamanan kegiatan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat yang dilaksanakan - Jumlah Pengamanan Pejabat dan asset daerah yang dilaksanakan - Jumlah pengawasan pejabat dan tamu	264 Kali 4015 Kali 1144 Kali 1144 Kali 365 kali 110 Kali	Rp.5.353.631.300

			daerah(VVIP/VIP) yang dilaksanakan -Jumlah tenaga ketenteraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat yang upahnya dibayarkan	216 Orang	
2	- Penindakan atas gangguan ketenteraman dan ketertiban umum berdasarkan perda dan perkara	- tertanganinya pelanggaran K3 dan unjuk rasa serta kerusuhan massa	-Jumlah Penertiban gangguan /pelanggran ketenteraman ketertiban umum yang dilaksanakan -Jumlah penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa yang dilaksanakan	132 Kali 10 Kali	Rp.77.783.300
3	- Koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	- Terlaksananya koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tingkat kabupaten/kota	-Jumlah rapat koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum tingkat kecamatan yang dilaksanakan	128 Orang	Rp.61.940.000
4	- Pemberdayaan Perlindungan masyarakat dalam rangka ketenteraman dan ketrtiban umum	- Terlaksananya pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketenteraman dan ketertiban umum	-Jumlah Satlinmas yang dikukuhkan -Jumlah anggota Satlinmas yang mengikuti pelatihan -Jumlah kegiatan pemberdayaan Satlinmas yang dilaksanakan -Jumlah monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan -Jumlah pleibatan (mobilisasi)Satlinmas dalam kegiatan penanggulangan bencana	128 Orang 128 Orang 2 Kegiatan 4 Kali 12 Kali	Rp.80.570.000

Program Penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum didukung oleh 1 (satu) kegiatan dan 4 (empat) sub kegiatan yang berkontribusi terhadap capaian kinerja program.

Berikut Perjanjian kinerja yang telah dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja kegiatan antara Kepala Seksi pencegahan, operasi dan pengendalian (Eselon IV) dan Kepala seksi Perlindungan Masyarakat

(Eselon IV) dengan Kepala Bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat (Eselon III)

Tabel 2.8
Perubahan Perjanjian Kinerja
Kepala Seksi Pencegahan, Operasi dan Pengendalian
(Eselon IV)

NO	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA	ANGGARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Tercegahnya gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	- Jumlah Operasi deteksi dini dan cegah dini yang dilaksanakan - Jumlah operasi patroli ketenteraman dan ketertiban umum - Jumlah Pembinaan dan penyuluhan ketenteraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan - Jumlah Pengamanan kegiatan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat yang dilaksanakan - Jumlah Pengamanan Pejabat dan asset daerah yang dilaksanakan - Jumlah pengawalan pejabat dan tamu daerah (VVIP/VI P) yang dilaksanakan - Jumlah tenaga ketenteraman dan ketertiban umum dan perlindungan	264 Kali 4015 Kali 1144 Kali 1144 Kali 365 kali 110 Kali 216 Orang	

			masyarakat yang upahnya dibayarkan		
2	- Penindakan atas gangguan ketenteraman dan ketertiban umum berdasarkan perda dan perkara	- tertanganinya pelanggaran K3 dan unjuk rasa serta kerusuhan massa	- Jumlah Penertiban gangguan /pelanggran ketenteraman ketertiban umum yang dilaksanakan - Jumlah penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa yang dilaksanakan	132 Kali 10 Kali	

Tabel 2.9
Perubahan Perjanjian Kinerja
Kepala Seksi Perlindungan Masyarakat
(Eselon IV)

NO	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA	ANGGARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	- Koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	- Terlaksananya koordinasi penyelenggara n ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tingkat kabupaten/kota	-Jumlah rapat koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum tingkat kecamatan yang dilaksanakan	- 22 Kali	
2	- Pemberdayaan Perlindungan masyarakat dalam rangka ketenteraman dan ketrtiban umum	- Terlaksananya pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketenteraman dan ketertiban umum	-Jumlah Satlinmas yang dikukuhkan -Jumlah anggota Satlinmas yang mengikuti pelatihan -Jumlah kegiatan pemberdayaan Satlinmas yang dilaksanakan -Jumlah monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan -Jumlah pelibatan (mobilisasi)Satlinmas dalam kegiatan penanggulangan bencana	128 Orang 128 Orang 2 Kegiatan 4 Kali 12 Kali	

3) Bidang Sumber Daya Manusia Dan Sarana Prasarana

Bidang Sumber daya Manusia dan Sarana Prasarana melaksanakan 1 (satu) Program yang sama dengan 2 (dua) Bidang Lainnya yaitu Program Peningkatan ketenteraman dan ketertiban Umum. Program tersebut dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis I (SS1) Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Ketenteraman Masyarakat dengan indikator kinerja utama **"Persentase Standar Teknis dan Mutu Pelayanan Dasar SPM Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum"** dan Indikator Kinerja Program **"Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkara"**.

Dalam rangka pencapaian target kinerja program, Kepala Bidang Sumber Daya Manusia dan Sarana Prasarana (Eselon III) telah melakukan perjanjian kinerja dengan Kepala Satpol PP (Eselon II). Perjanjian Kinerja tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.10
Perubahan Perjanjian Kinerja
Kepala Bidang Sumber Daya Manusia Dan Sarana Prasarana (Eselon III)

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	TARGET KINERJA	ANGGARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum sesuai Standar pelayanan Minimal	- Persentase pemenuhan Standar Teknis dan Mutu Pelayanan dasar SPM Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum - Persentase warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada	66,99%	Rp 558.009.269
1	- Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tertanganinya gangguan ketenteraman dan ketertiban Umum	- Persentase SDM Aparatur Terlatih - Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Minimal	40,61% 23%	Rp 518.385.000

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	TARGET KINERJA	ANGGARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	- Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan perlindungan masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas	Meningkatnya Kompetensi SDM aparatur Polisi Pamong Praja	- Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti pelatihan peningkatan Kapasitas - Jumlah Kegiatan pelatihan peningkatan kapasitas SDM Satpol PP yang dilaksanakan - Jumlah Kegiatan peningkatan kapasitas SDM Satgas Linmas Kabupaten dan kecamatan yang dilaksanakan - Jumlah Polisi Pamong Praja yang mengikuti diklat kompetensi - Jumlah Satgas Linmas Kabupaten dan Kecamatan yang mengikuti Pelatihan	216 Orang 5 Kegiatan 1 Kegiatan 6 Orang 128 Orang	Rp.278.270.000
2	- Kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan dan penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	- Terlaksananya Kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan dan penanganan gangguan K3.	- Jumlah kerjasama penyelenggaraan Trantibum dan Penegakan Perda yang dilaksanakan	2 Kegiatan	Rp.24.760.000
3	- Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan Prasarana ketenteraman dan ketertiban	- Terpenuhinya dan terpeliharanya sarana dan prasarana trantibum sesuai standar	- Jumlah Gedung Posko Trantibum Yang diadakan - Jumlah Kendaraan Operasional Yang diadakan - Jumlah Perlengkapan Operasional yang diadakan - Jumlah Sarana dan prasarana ketenteraman dan ketertiban umum yang dipelihara	0 unit 2 unit 84 Unit 55 Unit	Rp.189.635.000

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	TARGET KINERJA	ANGGARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4	- Penyusunan SOP Ketenteraman masyarakat dan Ketertiban umum	- Tersedianya SOP ketenteraman dan ketertiban umum sebagai pedoman	- Jumlah Dokumen SOP Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang disusun/dimutakhirkan	10 Dokumen	Rp.18.060.000
5	- Penyediaan layanan dalam rangka dampak penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	- Tersedianya layanan dalam rangka dampak penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	- Jumlah Layanan ganti rugi kerusakan barang/asset akibat dampak penegakan Perda dan Perkada - Jumlah Layanan pengobatan cedera akibat terkena dampak penegakan perda dan Perkada	5 Unit 5 Orang	Rp.7.660.000
2	- Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	- Meningkatnya Kompetensi PPNS	- Persentase PPNS yang Berkompeten	75%	Rp.37.374.269
7	- Pengembangan Kapasitas PPNS	- Terlaksananya pengembangan Kapasitas PPNS	- Jumlah PPNS yang mengikuti Diklat PPNS - Jumlah PPNS yang mengikuti diklat pengembangan PPNS - Jumlah Rakor PPNS yang dilaksanakan	2 Orang 3 Orang 4 Kali	Rp.37.374.269

Dalam rangka pencapaian target kinerja kegiatan tersebut di atas telah dilakukan perjanjian kinerja antara Kepala Bidang Sumber Daya Manusia dan sarana Prasarana (Eselon III) dengan 2 (dua) Kepala Seksi di bawahnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Berikut perjanjian kinerja perubahan Eselon IV yang telah dilakukan.

Tabel 2.11
Perubahan Perjanjian Kinerja
Kepala Seksi Pengembangan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur dan Kerjasama (Eselon IV)

NO	SUB KEGIATAN	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	ANGGARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	- Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja	Meningkatnya Kompetensi SDM aparatur Polisi Pamong	- Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti	216 Orang	

	dan perlindungan masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas	Praja	pelatihan peningkatan Kapasitas - Jumlah Kegiatan pelatihan peningkatan kapasitas SDM Satpol PP yang dilaksanakan 5 Kegiatan - Jumlah Kegiatan peningkatan kapasitas SDM Satgas Linmas Kabupaten dan kecamatan yang dilaksanakan 1 Kegiatan - Jumlah Polisi Pamong Praja yang mengikuti diklat kompetensi 10 Orang - Jumlah Satgas Linmas Kabupaten dan Kecamatan yang mengikuti Pelatihan 128 Orang		
2	- Kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan dan penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	- Terlaksananya Kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan dan penanganan gangguan K3	- Jumlah kerjasama penyelenggara an Trantibum dan Penegakan Perda yang dilaksanakan	2 Kegiatan	Rp 52.035.000
3	- Pengembangan Kapasitas PPNS	- Terlaksananya pengembangan Kapasitas PPNS	- Jumlah PPNS yang mengikuti Diklat PPNS 2 Orang - Jumlah PPNS yang mengikuti diklat pengembangan PPNS 3 Orang - Jumlah Rakor PPNS yang dilaksanakan 4 Kali		

Tabel 2.12
Perubahan Perjanjian Kinerja
Kepala Seksi Sarana Prasarana, Data Dan Informasi
(Eselon IV)

NO	SUB KEGIATAN	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	ANGGARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	- Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan Prasarana ketenteraman dan ketertiban	- Terpenuhinya dan terpeliharanya sarana dan prasarana trantibum sesuai standar	- Jumlah Gedung Posko Trantibum Yang diadakan - Jumlah Kendaraan Operasional Yang diadakan - Jumlah Perlengkapan Operasional yang diadakan - Jumlah Sarana dan prasarana ketenteraman dan ketertiban umum yang dipelihara	0 unit 2 unit 63 Unit 47 Unit	
2	- Penyusunan SOP Ketenteraman masyarakat dan Ketertiban umum	- Tersedianya SOP ketenteraman dan ketertiban umum sebagai pedoman	- Jumlah Dokumen SOP Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang disusun/dimutakhirkan	10 Dokumen	
3	- Penyediaan layanan dalam rangka dampak penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	- Tersedianya layanan dalam rangka dampak penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	- Jumlah Layanan ganti rugi kerusakan barang/asset akibat dampak penegakan Perda dan Perkada - Jumlah Layanan pengobatan cidera akibat terkena dampak penegakan perda dan Perkada	5 Unit 5 Orang	

4) Sekretariat

Sekretariat melaksanakan Program Pendukung operasional di Satpol PP. Program yang dilaksanakan oleh Sekretariat terdiri dari 7 (tujuh) Kegiatan dan 35 (Tiga Puluh Lima) Sub Kegiatan. Kegiatan dan Sub Kegiatan tersebut merupakan merupakan supporting dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

Berikut Perjanjian Kinerja yang diperjanjikan antara Sekretaris (Eselon III) dengan Kepala Satuan (Eselon II) dalam rangka pencapaian Program dan Perjanjian Kinerja antara Kepala Sub Bagian (Eselon IV) dengan Sekretaris (Eselon III) dalam rangka pencapaian kinerja Kegiatan dan Sub Kegiatan.

Tabel 2.13
Perubahan Perjanjian Kinerja
Sekretaris (Eselon III)

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET KINERJA	ANGGARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Terpenuhinya Penunjang Urusan Perangkat Daerah	Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah berjalan sesuai standar	100%	Rp 5.560.355.754
1	- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi tepat waktu	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi tepat waktu	100%	Rp 122.426.867
2	- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terselenggaranya administrasi keuangan dengan baik	Persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik	100%	Rp.3.929.381.233
3	- Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Teradministrasikannya BMD Perangkat Daerah sesuai standar	Persentase BMD Perangkat Daerah yang diadministrasikan yang sesuai standar	100%	Rp 32.329.006
4	- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi	100%	Rp 303.657.098

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET KINERJA	ANGGARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		dengan baik	kepegawalan Perangkat Daerah		
5	- Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tertindakannya administrasi umum Perangkat Daerah dengan baik	Persentase rata- rata capaian kinerja administrasi umum	100%	Rp 470.513.650
6	- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tertindakannya pemuatan BMD Penunjang Perangkat Daerah	Persentase BMD penunjang Perangkat Daerah yang terpenuhi	75%	Rp 355.250.000
7	- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tertindakannya jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah	Persentase rata- rata capaian kinerja penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100%	Rp 99.237.900
8	- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan baik	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpelihara dengan baik	100%	Rp 247.560.000

Tabel 2.14
Perjanjian Kinerja
Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan (Eselon IV)

NO	SUB KEGIATAN	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	ANGGARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan dengan baik dan tepat waktu	Jumlah DOKumen Perencanaan Perangkar Daerah yang disusun	2 dokumen	
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Tersusunnya dokumen RKA dengan baik dan tepat waktu	Jumlah dokumen RKA- SKPD yang disusun	1 dokumen	

NO	SUB KEGIATAN	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	ANGGARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersusunnya dokumen Perubahan RKA dengan baik dan tepat waktu	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD yang disusun	1 dokumen	
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersusunnya dokumen DPA-SKPD dengan baik dan tepat waktu	Jumlah dokumen DPA-SKPD yang disusun	1 dokumen	
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Tersusunnya dokumen Perubahan DPA-SKPD dengan baik dan tepat waktu	Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD yang disusun	1 dokumen	
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD	3 Dokumen	
7	Evaluasi Kinerja perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen evaluasi kinerja perangkat Daerah	12 dokumen	
8	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarkannya gaji dan tunjangan bagi ASN	Jumlah ASN yang gaji dan tunjangan terbayarkan	39 orang	
9	Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Tersedianya administrasi pelaksanaan tugas ASN	Persentase ketersediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	100 %	
10	Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Terlaksananya penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Persentase penyelesaian dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	1 Dokumen	
11	Koordinasi dan penyusunan Laporan akhir tahun SKPD	Terlaksananya koordinasi dan penyusunan laporan akhir tahun SKPD	Jumlah Laporan keuangan akhir Tahun perangkat Daerah yang disusun tepat waktu	1 dokumen	
12	Pengelolaan dan penyiapan	Terlaksananya pengelolaan dan	Jumlah dokumen	2 dokumen	

NO	SUB KEGIATAN	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	ANGGARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	bahan tanggapan pemeriksaan	penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan	laporan tanggapan pemeriksaan yang disusun tepat waktu		
13	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Tersusunnya laporan keuangan perangkat daerah dengan baik	Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran SKPD yang disusun	12 dokumen	
14	Penyusunan perencanaan barang milik daerah	Terselenggaranya administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan barang milik daerah SKPD yang disusun	2 dokumen	
15	Rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD	Terlaksananya rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD	Jumlah laporan hasil rekonsiliasi barang milik daerah	1 dokumen	
16	Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	Terlaksananya penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen laporan barang milik daerah pada SKPD yang disusun	4 dokumen	

Tabel 2.15
Perubahan Perjanjian Kinerja
Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian (Eselon IV)

NO	SUB KEGIATAN	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	ANGGARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pendataan dan pengelolaan administrasi kepegawaian	Tersusunnya laporan administrasi kepegawaian yang dimutakhirkan	Jumlah laporan data kepegawaian yang dimutakhirkan	4 dokumen	
2	Monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	Terlaksananya monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja	Jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan penilaian	12 dokumen	

NO	SUB KEGIATAN	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	ANGGARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		pegawai	kinerja pegawai		
3	Pendidikan dan pelatihan berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi	terlaksananya pendidikan dan pelatihan teknis fungsional sesuai tugas dan fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis fungsional sesuai tugas dan fungsi	-	
4	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya sosialisasi peraturan Perundang-undangan bagi ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan sosialisasi peraturan perundang-undangan	42 orang	
5	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya bimbingan teknis pengimplemen tasian peraturan perundang-undangan	Jumlah pegawai yang mengikut bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	7 orang	
6	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	166 buah	
7	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang diadakan	191 buah	
8	Penyediaan bahan logistic kantor	Tersedianya bahan logistic kantor	Jumlah jenis bahan logistic kantor yang disediakan	11 jenis	
9	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan/ atau penggandaan yang diadakan	10 jenis	
10	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-	72 eksample r	

NO	SUB KEGIATAN	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	ANGGARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			undangan		
11	Fasilitas Kunjungan Tamu	Terfasilitasinya kunjungan tamu	Jumlah tamu yang difasilitasi	180 orang	
12	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Perangkat Daerah	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diikuti	384 kali	
13	Penyediaan jasa surat menyurat	Terlaksananya administrasi surat keluar dan surat masuk	Jumlah surat masuk dan keluar yang diadministrasikan	2500 surat	
14	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayarkannya rekening listrik, air dan telepon	Jumlah rekening telepon, listrik dan air yang terbayarkan	84 rekening	
15	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya jasa tenaga pelayanan umum kantor	Jumlah jasa tenaga pelayanan umum kantor yang disediakan	1 orang	
16	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terpeliharanya kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1 unit	
17	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpeliharanya kendaraan dinas operasional	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	28 unit	
18	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya peralatan kantor dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang	100 unit	

NO	SUB KEGIATAN	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	ANGGARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			dipelihara		
19	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharanya gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor dan/atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	2 unit	
20	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Terpeliharanya sarana dan prasarana kantor atau bangunan lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ rehabilitasi	7 jenis	

1.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah merupakan perwujudan kewajiban instansi Pemerintah untuk memberikan pertanggungjawaban secara periodik atas keberhasilan dan kegagalan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Dalam memberikan pertanggungjawaban akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, digunakan pengukuran kinerja yang dituangkan dalam bentuk satuan yang terukur dan terdiri dari pengukuran kinerja kegiatan, pencapaian sasaran tahunan dan analisis akuntabilitas kinerja.

Pengukuran capaian kinerja Tahun 2022 merupakan pengukuran dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dan Rencana Aksi yang telah disepakati bersama.

Untuk memberikan gambaran keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian sasaran dilakukan pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja capaian dilakukan dengan mengukur pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja dengan membandingkan antara target dan realisasi. Secara ringkas capaian kinerja Sasaran Strategis Satpol PP pada Tahun 2022, dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel. 3.1
Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Utama
Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	Persentase penurunan pelanggaran Perda/perkada	9,10 %	8,93%	98,13%
		Persentase Penurunan gangguan Ketenteraman dan ketertiban Umum	9,10 %	9,06%	99,56%
		Persentase Standar teknis dan Mutu Pelayanan dasar SPM Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	66,99 %	55,82%	83,32%
2	Meningkatnya Kualitas dan Pencapaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Program Perangkat daerah	100%	100%	100%

Analisis capaian indikator kinerja utama (IKU)

IKU 1

- Persentase Penurunan Pelanggaran Perda/Perkada

Formula yang digunakan untuk menghitung indikator ini adalah :

$$\frac{\text{Jumlah pelanggaran perda Tahun 2021-} \\ \text{Jumlah Pelanggaran perda tahun 2022}}{\text{Jumlah pelanggaran PERDA Tahun 2021}} \times 100\%$$

berdasarkan Formula diatas indikator Penurunan pelanggaran perda/perkada diperoleh sebesar 9,06 % dimana Jumlah pelanggaran Perda Tahun 2021 sebanyak 1037 Kasus dikurang jumlah pelanggaran perda Tahun 2022 sebanyak 943 dibagi jumlah pelanggaran perda Tahun 2021 sebanyak 1037 di kali 100%

- **Persentase Penurunan Pelanggaran Gangguan Trantibum**
Dengan formula sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah pelanggaran Gangguan Trantibum Tahun 2021} - \text{Jumlah Pelanggaran Gangguan Trantibum tahun 2022}}{\text{Jumlah pelanggaran Gangguan Trantibum Tahun 2021}} \times 100\%$$

Dari formula diatas maka persentase penurunan pelanggaran gangguan trantibum dapat dihitung yaitu jumlah gangguan trantibum Tahun 2021 sebanyak 459 dikurang jumlah pelanggaran gangguan trantibum Tahun 2022 sebanyak 418 dibagi jumlah pelanggaran gangguan trantibum Tahun 2021 sebanyak 459 di kali 100 % diperoleh realisasi sebesar 8,93% dari target sebesar 9,10 % jadi capaiannya 98,13%

- **Persentase Pemenuhan Standar teknis dan mutu layanan dasar SPM Trantibum**
Dengan formula sebagai berikut :

Persentase SDM aparatur satpol PP terlatih + Persentase Sarana Prasarana Minimal + Persentase Penyediaan SOP Trantibum + Persentase Warga Negara yang menerima layanan akibat dampak penegakan Perda/Perkada
Dengan asumsi masing-masing indikator 25%

Dari formula diatas dapat dihitung persentase Pemenuhan Standar teknis dan mutu layanan dasar SPM trantibum adalah persentase SDM aparatur satpol PP terlatih sebesar 49,34 ditambah persentase standar pemenuhan sarana prasarana trantibum sebesar 23,99 ditambah persentase SOP trantibum 50 di tambah persentase warga negara yang menerima layanan akibat dampak penegakan perda sebesar 100 lalu masing-masing indikator dikalikan 25 % sehingga diperoleh hasil 55,82% dengan capaian 83,32%

IKU 2

Persentase capaian kinerja program perangkat daerah

Persentase capaian kinerja program perangkat daerah dihitung melalui nilai rata-rata capaian kegiatan pada program urusan penunjang perangkat daerah dimana hasilnya adalah 100%

Tabel. 3.2
Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis
pada Tahun 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	meningkatnya kualitas penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum sesuai standar pelayanan minimal	Persentase Penegakan Perda	100,00%	100,00%	100,00%
		Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	100,00%	100,00%	100,00%
		Persentase warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada	100%	100%	100,00%
2.	Meningkatnya kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan perangkat daerah	Persentase capaian kinerja program perangkat daerah	100%	100%	100%

3. ANALISIS CAPAIAN KINERJA PROGRAM 1

1. Sasaran Strategis I (SS1)

Meningkatnya Kualitas penyelenggaraan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum sesuai Standar Pelayanan minimal

Analisis capaian kinerja dilakukan terhadap capaian sasaran strategis serta sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung sasaran strategis. Dalam menyimpulkan keberhasilan atau ketidakberhasilan pencapaian 2 (Dua) sasaran strategis di atas dilakukan dengan mengukur dan menganalisa capaian sasaran, indikator *outcome* program dan *intermediate outcome* kegiatan serta *output* subkegiatan yang berkontribusi terhadap pencapaian sasaran.

INDIKATOR KINERJA PROGRAM 1: **Persentase Penegakan Perda**

Pada sasaran strategis meningkatnya kinerja penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur capaian sasaran adalah: ***Persentase penegakan Perda*** dengan formulasi indikator sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah penyelesaian pelanggaran PERDA}}{\text{Jumlah pelanggaran PERDA}} \times 100\%$$

Capaian Indikator **Persentase penegakan Perda** pada Tahun 2022 sebesar 100% diperoleh dari Target sebesar 100,00% dan terealisasi sebesar 100%. Realisasi sebesar 100% diperoleh dari perhitungan jumlah laporan pelanggaran Perda yang terselesaikan sebanyak 943 kasus pelanggaran dibanding jumlah keseluruhan laporan pelanggaran Perda sebanyak 943 kasus pelanggaran.

Berikut disajikan tindak lanjut penanganan pelanggaran Perda yang terjadi pada Tahun 2022 yang diklasifikasikan ke dalam jenis pelanggaran Perda/Perkada sebagaimana table berikut:

Tabel. 3.3
Data Penyelesaian Pelanggaran Peraturan Daerah
pada Tahun 2022
Berdasarkan Peraturan Daerah yang Dilanggar

No	Jenis Pelanggaran	Perda Yang Dilanggar	L A P O R A N	Tindak Lanjut/Penyelesaian					
				Non-Yustisi				Yustisi	
				Surat Teguran/Peringatan	Pencabutan Izin	Penutupan/Pembongkaran	Yang Lain	Denda	Yang Lain
1	Garis Sempadan	PERDA NOMOR 5 TAHUN 2012	2	2	-	-	-	-	-
2	Minuman Beralkohol	PERDA NOMOR 3 TAHUN 2017	7	-	-	-	-	7	-
3	Izin Mendirikan Bangunan/ Bangunan Gedung	PERDA NOMOR 15 TAHUN 2010 DAN PERDA NOMOR 6 TAHUN 2011	-	-	-	-	-	-	-
4	Administrasi Kependudukan	PERDA NOMOR 1 TAHUN 2012	0	-	-	-	-	-	-
5	Izin Lingkungan	PERDA NOMOR 7 TAHUN 2014	-	-	-	-	-	-	-
6	Gangguan Ketenteraman dan ketertiban dan keindahan	PERDA NOMOR 9 TAHUN 2014	418	418	-	-	-	-	-
7	Pemeliharaan Ternak	PERDA NOMOR 9	-	-	-	-	-	-	-

No	Jenis Pelanggaran	Perda Yang Dilanggar	LAPORAN	Tindak Lanjut/Penyelesaian					
				Non-Yustisi				Yustisi	
				Surat Teguran/Peringatan	Pencabutan Izin	Penutupan/Pembongkaran	Yang Lain	Denda	Yang Lain
8	Penyelenggaraan Reklame	TAHUN 2014 PERDA NOMOR 1 TAHUN 2016	10	-	-	10	-	-	-
9	Pengelolaan Barang Milik Daerah	PERDA NOMOR 2 TAHUN 2017	0	-	-	-	-	-	-
11	Tertib Pendaratan Hasil Perikanan		0	-	-	-	-	-	-
12	Kawasan Tanpa Rokok	PERDA NOMOR 9 TAHUN 2016	34	-	-	-	34	-	-
13	Tera Ulang	PERDA NOMOR 1 TAHUN 2020	400				400		
14	Protokol Kesehatan	PERBUP NOMOR 23 TAHUN 2021	-						
15	Pengawasan Obat dan Makanan	PERDA NO 9 TAHUN 2014	72				72		
JUMLAH			943	420	-	10	506	7	-

Kegiatan dan Sub Kegiatan yang Mendukung Pencapaian Sasaran Strategis I pada Indikator Kinerja Program 1

Pada Indikator Kinerja Program 1, yang bertanggungjawab adalah Bidang Penegakan Peraturan Daerah. Bidang Penegakan Peraturan Daerah dalam berkontribusi terhadap capaian indikator kinerja melaksanakan program dengan menggunakan indikator program Persentase Penegakan Perda. Dalam mendukung pencapaian indikator program tersebut Bidang Penegakan Peraturan Daerah melaksanakan 1 (Satu) kegiatan yang terdiri dari 3 (Tiga) sub kegiatan.

Berdasarkan perjanjian kinerja dan evaluasi atas rencana aksi yang telah dilakukan secara berjenjang, berikut ini disajikan dalam tabel pengukuran kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Bidang Penegakan Peraturan Daerah pada Tahun 2022.

Tabel. 3.4
Pengukuran Capaian Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Pada Bidang Penegakan Peraturan Daerah
pada Tahun 2022

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penegakan Perda	-	-	
	- Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota dan Peraturan Bupati/ Walikota	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	-	-	
	1) Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	- Jumlah sosialisasi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yang dilaksanakan(kali)	30	30	100%
		- Jumlah warga negara yang memperoleh sosialisasi Perda/Perkada (orang)	1460	1460	100%
		- Jumlah sosialisasi pengendalian peredaran rokok ilegal yang dilaksanakan (kali)	11	11	100%
	2) Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	- Jumlah Pengawasan potensi pelanggaran pelaksanaan Perda dan Perkada yang dilaksanakan (kali)	30	30	100%
		- Jumlah Pengawasan peredaran rokok ilegal yang dilaksanakan (kali)	11	11	100%
		- Jumlah pengawasan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) yang dilaksanakan (kali)	32	32	100%
	3) Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	- Jumlah kasus pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yang tertangani	50	50	100%
		- Jumlah pelanggaran Kawasan Tanpa Rokok (KTR) yang tertangani (kasus)	15	15	100%

Capaian Kinerja Kegiatan dan Sub Kegiatan yang mendukung Pencapaian Kinerja Program

Berikut ini penjabaran capaian kinerja Kegiatan dan Sub Kegiatan yang berkontribusi terhadap pencapaian kinerja Program.

1. Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota dan Peraturan Bupati/ Walikota

Indikator kinerja kegiatan ini adalah Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan dengan formulasi:

$$\frac{\text{Jumlah Perda/Perkada memuat sanksi yang ditegakkan}}{\text{Jumlah Perda/Perkada memuat sanksi}} \times 100\%$$

Berdasarkan data, jumlah Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yang memuat sanksi baik administrasi maupun pidana sebanyak 32 Perda/Perbup. Seluruh Perda/Perbup tersebut dapat ditegakkan sehingga capaian kinerja kegiatan diperoleh sebesar 100%. Kegiatan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati dilaksanakan melalui sosialisasi, pengawasan dan penindakan pelanggaran.

Adapun Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota dan Peraturan Bupati/ Walikota terdiri dari 3 (tiga) sub kegiatan yaitu:

1) Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota

Sub kegiatan sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota memiliki 3 (tiga) indikator kinerja diantaranya :

1) jumlah sosialisasi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yang dilaksanakan diperoleh capaian sebesar 100%. Dari target Sampai Triwulan IV sebanyak 30 kali pelaksanaan, terlaksana sebanyak 30 kali dengan capaian 100 %, 2) jumlah warga Negara yang memperoleh sosialisasi perda/perkada diperoleh capaian sebesar 100 % dari target sampai dengan triwulan IV sebanyak 1460 orang dan terealisasi sebanyak 1460 orang, 3) jumlah sosialisasi pengendalian peredaran rokok ilegal yang dilaksanakan dari target sampai dengan triwulan IV sebanyak 11 kali dan terealisasi sebanyak 11 kali dengan persentase capaian 100 %

2) Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota

Sub kegiatan pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota yang terdiri dari 3 (tiga) indikator diantaranya adalah: 1) jumlah pengawasan potensi pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah yang dilaksanakan diperoleh capaian sebesar 100% dengan perhitungan target pengawasan sampai Triwulan III sebanyak 30 kali dan terealisasi sebanyak 30 kali, 2) jumlah pengawasan peredaran rokok ilegal yang dilaksanakan diperoleh capaian sebesar 100% dari target 11 kali pengawasan dan terealisasi melebihi target sebanyak 11 kali. Dari hasil pengawasan ini juga ditemukan sampai dengan triwulan IV ini sebanyak 34 kasus peredaran rokok ilegal dengan jumlah total rokok ilegal yang ditemukan sampai triwulan IV sebanyak 4.580 batang dan telah ditangani bersama Tim terpadu, 3) jumlah pengawasan kawasan tanpa rokok (KTR) yang dilaksanakan dari target 32 kali pelaksanaan dan terealisasi sebanyak 32 kali dengan persentase capaian sampai dengan triwulan IV sebesar 100%

3) Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota

Salah satu indikator dalam sub kegiatan ini adalah Jumlah pelanggaran Perda/perkada yang ditangani. Diperoleh capaian 100 % dari indikator ini bila berdasarkan DPA Satpol PP target 50 kasus dan realisasi 39 kasus yang ditangani. namun pada kenyataan di lapangan terdapat 943 kasus yang ditemukan dan semua ditindaklanjuti. terdapat 936 kasus ditindak lanjuti secara non yustisi dan 7 kasus ditangani secara yustisi.

Indikator Kinerja Program 2: Persentase Gangguan Ketenteraman dan ketertiban Umum Yang Ditangani

Indikator 2 untuk mengukur capaian kinerja sasaran strategis I (SS1) meningkatnya kualitas penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum sesuai standar pelayanan minimal adalah persentase gangguan Trantibum yang ditangani dengan menggunakan Formulasi indikator sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah gangguan K3 yang ditangani}}{\text{Jumlah gangguan K3 keseluruhan yang dilaporkan/ teridentifikasi}} \times 100\%$$

Target dari indikator tersebut yang harus dicapai sampai dengan Triwulan IV Tahun 2022 adalah 100.00% dan terealisasi 100.00%, sehingga diperoleh persentase capaian sebesar 100.00%. Realisasi sebesar 100.00% diperoleh dari perhitungan jumlah temuan/laporan gangguan K3 sebanyak **418** gangguan/potensi gangguan yang berasal dari laporan masyarakat, laporan operasional patroli rutin serta laporan pengamanan kegiatan dan objek vital. Dari jumlah gangguan/potensi gangguan tersebut, seluruhnya dapat tertangani oleh petugas Satpol PP.

Pada Indikator ***Tingkat Penyelesaian Pelanggaran Ketertiban, Ketenteraman dan Keindahan (K3)*** dapat memenuhi target 100% dimana setiap adanya laporan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum atau hasil patroli ditemukan gangguan/potensi gangguan, maka akan langsung ditangani dan diselesaikan oleh petugas Satpol PP. Salah satu faktor yang menyebabkan keberhasilan pencapaian sasaran tersebut adalah penugasan Satpol PP di setiap Kecamatan. Dengan adanya Satpol PP di setiap Kecamatan yang melaksanakan tugas patroli rutin setiap hari, maka faktor geografis (rentan kendali) dalam penanganan gangguan dapat teratasi dengan cepat dan dampak gangguan yang lebih luas dapat dicegah.

Berikut disajikan data penanganan gangguan Ketenteraman, Ketertiban dan Keindahan (K3) Tahun 2022

Tabel. 3.5
Data Penanganan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban dan Keindahan (K3) pada Tahun 2022

No	Jenis Tertib	Jenis Gangguan	Temuan/Laporan	TL	Bentuk Tindak Lanjut
1	Tertib Pendidikan	Pelajar berkeliraran di luar sekolah pada jam sekolah, Pelajar mabuk lem dan obat-obatan	112	112	Memberikan pembinaan fisik dan surat pernyataan tidak mengulangi; orang tua dan guru dipanggil untuk pembinaan lebih lanjut.

No	Jenis Tertib	Jenis Gangguan	Temuan/Laporan	TL	Bentuk Tindak Lanjut
2	Tertib Jalur Hijau, Taman dan Tempat Umum	Pemasangan Alat Peraga Kampanye, Baliho, Spanduk dan Jenis Iklan/Media Informasi pada Pohon, Tiang Listrik dan Fasilitas umum lainnya	21	21	Menurunkan/mencabut APK, Baliho dan Spanduk serta bentuk Iklan/Media Informasi lainnya yang mengganggu ketertiban umum dan keindahan.
3	Tertib Pedagang Kreatif Lapangan (PKL) dan Pasar	Berjualan pada bahu jalan	170	170	Memberikan pemahaman (persuasif) agar tidak menjual pada bahu jalan; bersama-sama pemilik memindahkan lapak dan barang dagangan ketempat yang sesuai dengan aturan.
4	Tertib Pemeliharaan Ternak	Hewan ternak berkeliaran di jalan; Kandang yang dekat dengan pemukiman	15	15	Memberikan teguran kepada pemilik ternak agar mengembalikan ternaknya sesuai aturan peternakan; memberikan pemahaman kepada pemilik kandang ternak agar dipindahkan ke tempat yang jauh dari pemukiman. Membantu bersama-sama memindahkan
5	Tertib Lingkungan	Penambangan galian Gol.C	30	30	Menghentikan operasional tambang galian Gol.C karena tidak memiliki Izin Lingkungan.
6	Tertib Bangunan	Melanggar sempadan jalan; mendirikan bangunan tanpa IMB	3	3	Memberikan pemahaman (persuasif) agar segera mengurus perizinan bangunannya dan menghentikan sementara sampai lengkap dokumen perizinannya; untuk bangunan yang melanggar sempadan diberikan pernyataan untuk membongkar sendiri bangunan yang melanggar.
7	Tertib Tempat Hiburan dan Keramaian	Menjual minuman beralkohol; pelayan diduga melakukan praktik prostitusi	-	-	Menghentikan operasional THM, pemilik diberikan surat pernyataan tidak akan membuka kembali dan kepada pelayan yang rata-rata berKTP luar Luwu Timur diberikan pernyataan untuk kembali ke daerah asal.

No	Jenis Tertib	Jenis Gangguan	Temuan/Laporan	TL	Bentuk Tindak Lanjut
8	Tertib Aparatur Sipil Negara	ASN bolos kerja kedapatan di pasar tanpa izin	4	4	Membuat surat pernyataan agar tidak lagi mengulangi perbuatannya
9	Tertib Sosial	Meminta sumbangan dengan surat legalitas palsu			Mengamankan peminta sumbangan tersebut dan membuat surat pernyataan untuk tidak mengulangi perbuatannya
10	Tertib Kesehatan	Merokok pada KTR; menjual mamin kadaluarsa	-	-	Melakukan teguran dan sosialisasi agar tidak lagi merokok pada KTR; melaporkan kepada pejabat yang berwenang menangani mamin kadaluarsa
12	Tertib Jalan	Material bahan bangunan yang berada diatas badan jalan/trotoar, mobil yang terparkir lama di bahu jalan	31	31	Memindahkan material atau kendaraan yang berada diatas trotoar/bahu jalan
13	Tertib angkutan sungai dan angkutan darat	Kendaraan bak terbuka yang memuat pasir	16	16	Memberikan teguran kepada pemilik truk untuk menggunakan terpal sebagai penutup bak saat memuat material pasir
14	Tertib drainase	Mendirikan bangunan tempat usaha diatas drainase	16	16	Memberikan teguran kepada pemilik usaha yang ditemukan
Jumlah			418	418	

Sumber: Satpol PP

Program dan Kegiatan yang Mendukung Pencapaian Indikator Kinerja Program

Pada Indikator Kinerja Program 2, yang bertanggungjawab adalah Bidang Ketenteraman, Ketertiban umum dan Perlindungan masyarakat. Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat dalam mendukung pencapaian Indikator tersebut melaksanakan program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dengan menggunakan indikator program Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan. Dalam mendukung pencapaian indikator program tersebut Bidang Ketenteraman, ketertiban umum

dan perlindungan masyarakat melaksanakan 1 (satu) kegiatan yang terdiri dari 4 (Empat) sub kegiatan.

Berdasarkan perjanjian kinerja dan evaluasi atas rencana aksi yang telah dilakukan secara berjenjang, berikut ini disajikan dalam tabel pengukuran kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Bidang ketenteraman, Ketertiban Umum dan perlindungan masyarakat sampai dengan Triwulan IV Tahun 2022.

Tabel.3.6
Capaian Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Pada Bidang Trantibum dan Linmas
s.d Triwulan IV Tahun 2022

No	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	100%	100%	100.00%
a.	Penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	- Persentase tertib penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum yang ditangani - Persentase Satlinmas Desa/kelurahan yang aktif	100% 8,59%	100% 8,58%	100.00% 100%
	- Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawasan	- Jumlah Operasi Patroli Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang dilaksanakan - Jumlah operasi deteksi dini dan cegah dini yang dilaksanakan - Jumlah operasi pembinaan dan penyuluhan ketenteraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan - Jumlah pengamanan kegiatan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat yang disediakan - Jumlah pengamanan pejabat dan asset daerah yang dilaksanakan - Jumlah pengawasan pejabat dan tamu daerah(VVIP/VIP) yang dilaksanakan - Jumlah tenaga ketenteraman dan	4015 264 1144 1144 365 110 199	3421 170 1125 857 365 110 183	85,21% 64,39% 98,34% 74,91% 100% 100% 91,98%

	ketertiban umum dan perlindungan masyarakat yang upahnya dibayarkan			
- Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	- Jumlah Operasi penertiban pelanggaran gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang dilaksanakan	132	132	100%
	- Jumlah penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa yang dilaksanakan	10	10	100%
- Koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tingkat kabupaten/kota	- Jumlah rapat koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan	22	22	100%
- Pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketenteraman dan ketertiban umum	- Jumlah pelibatan(mobilisasi) Satlinmas dalam kegiatan penanggulangan bencana	12	12	100%
	- Jumlah Anggota Satlinmas yang mengikuti Pelatihan	128	128	128
	- Jumlah kegiatan pemberdayaan Satlinmas yang dilaksanakan	2	2	100%
	- Jumlah anggota Satlinmas yang dikukuhkan	0	0	0
	- Jumlah monitoring dan evaluasi Satlinmas yang dilaksanakan	4	4	100%

Berdasarkan pengukuran kinerja di atas, Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat dalam mengukur kinerja Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, menggunakan indikator Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan dengan formulasi indikator sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah gangguan Trantibum yang diselesaikan}}{\text{Jumlah gangguan Trantibum keseluruhan yang dilaporkan/ teridentifikasi}} \times 100\%$$

Target dari indikator tersebut yang harus dicapai pada sampai dengan Tahun 2022 adalah 100.00% dan terealisasi 100.00%, sehingga diperoleh

persentase capaian sebesar 100.00%. Realisasi sebesar 100.00% diperoleh dari perhitungan jumlah temuan/laporan gangguan Trantibum sebanyak 418 gangguan/potensi gangguan yang berasal dari laporan masyarakat, laporan operasional patroli rutin serta laporan pengamanan kegiatan dan objek vital. Dari jumlah gangguan/potensi gangguan tersebut, seluruhnya dapat tertangani oleh petugas Satpol PP.

Capaian Kinerja Kegiatan dan Sub Kegiatan yang mendukung Pencapaian Kinerja Program

Untuk melihat penjabaran capaian kinerja masing-masing kegiatan yang mendukung capaian program akan dijabarkan pada bagian capaian kinerja kegiatan di bawah ini.

Berikut ini penjabaran capaian kinerja Kegiatan dan Sub Kegiatan yang berkontribusi terhadap pencapaian kinerja Program.

1. Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Dalam Satu Daerah Kabupaten/Kota

- Indikator kinerja kegiatan ini adalah Persentase Tertib Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditangani dengan formulasi:

$$\frac{\text{Jumlah Tertib Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditangani}}{\text{Jumlah Tertib Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum}} \times 100\%$$

Berdasarkan Perda kabupaten Luwu Timur Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman dan ketertiban Umum, jumlah jenis tertib sebanyak 16 tertib, dan dapat dilaksanakan atau ditangani oleh Satpol PP sebanyak 7 tertib sehingga diperoleh capaian kinerja kegiatan ini sebesar 100%. Penanganan 16 jenis tertib tersebut dilaksanakan melalui Patroli Trantibum, pengamanan kegiatan, pengawalan, pembinaan, deteksi dini dan cegah dini serta penertiban.

- Indikator persentase Satlinmas desa/Kelurahan aktif dihitung dengan formula sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah Desa/Kelurahan Yang Satlinmasnya diberikan Pembinaan}}{\text{Jumlah seluruh Desa/kelurahan}} \times 100\%$$

Dari Formula diatas berdasarkan kegiatan pembinaan Satlinmas Desa yang dilakukan pada tahun 2022 sebanyak 11 desa/kelurahan yang dilakukan pembinaan Satlinmas dari total Desa/kelurahan yang ada di kabupaten Luwu Timur sebanyak 128 Desa/Kelurahan. Sehingga diperoleh realisasi sebesar 8,59 % dan sesuai target yang telah ditentukan dalam renstra.

Adapun Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Dalam Satu Daerah Kabupaten/Kota, terdiri dari 9 (sembilan) sub kegiatan, namun dalam mendukung pencapaian indikator kinerja Bidang Trantibum dan Linmas hanya melaksanakan 4 (Empat) sub kegiatan:

- 1) Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawalan.

Sub Kegiatan ini dilaksanakan untuk pencegahan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum melalui patroli, pengamanan, pengawalan dan kegiatan cegah dini. Terdapat 7 (tujuh) indicator pada sub kegiatan ini dan ada 4(empat) indikator yang capaiannya tdk 100% yaitu 1)Jumlah Operasi Patroli ketenteraman dan ketertiban umum dari target 4015 kali terealisasi 3421 dengan capaian 85,21% hal tersebut disebabkan minimnya anggaran operasional yang disediakan untuk kegiatan Patroli sementara target kinerja tinggi.2) jumlah kegiatan deteksi dini dan cegah dini dari target 264 terealisasi 170 kali dengan capaian 64,39% hal ini disebabkan anggaran untuk kegiatan tersebut baru diakomodir pada perubahan DPA sehingga pelaksanaannya tidak maksimal; 3). jumlah pengamanan kegiatan pemerintah,pemerintah

daerah dan masyarakat yang dilaksanakan, dari target 1144 kali terealisasi 857 kali dengan capaian 74,91 % hal ini disebabkan karena kegiatan ini sifatnya disediakan untuk kegiatan acara atau ceremony dari pemerintah, pemda dan masyarakat bila ada. 4) jumlah tenaga ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat yang dibayarkan upahnya dari target 199 orang yang terbayar triwulan ini 193 orang dengan capaian 91,98% hal ini disebabkan adanya tenaga upah jasa yang mengundurkan diri atau tidak lagi memperpanjang kontraknya dan pengusulan penggantian saat ini belum dapat diproses menunggu regulasi yang jelas untuk penerimaan upah jasa sehingga menyebabkan target nya yang terus menurun setiap triwulan walaupun target telah dikurangi pada perubahan DPA TA. 2022 dari 216 orang menjadi 199 orang.

- 2) Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa.

Sub Kegiatan Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa terdiri dari 2 output yaitu: Jumlah penertiban gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang dilaksanakan sebanyak 100 kali. Indikator 2 adalah Jumlah penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa yang dilaksanakan sebanyak 10 kali dari target dari target yang 10 kali. Sehingga capaian dari sub kegiatan ini 100%.

- 3) Koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tingkat/kabupaten/kota

Pada Sub Kegiatan ini Target jumlah rapat koordinasi yang akan dilaksanakan dengan target sebanyak 22 kali dan telah terealisasi sebanyak 22 kali yang pelaksanaannya dilakukan di ditingkat kecamatan.

- 4) Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum.

Pada sub kegiatan ini terdapat 5(lima) Indikator dan dari kelima indikator tersebut hanya terdapat 2 (dua) indikator saja yang memiliki target untuk triwulan IV Tahun 2022 yaitu indikator 1) Jumlah pelibatan(mobilisasi) Satlinmas dalam kegiatan penanggulangan bencana yang pelaksanaannya 11 kali dan terealisasi 100% dan indikator 2) jumlah monitoring dan evaluasi Satlinmas yang dilaksanakan dengan target sebanyak 4(empat) kali dan terealisasi sebanyak 4 kali dengan capaian 100%.

Indikator Kinerja Program 3: Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari dampak penegakan hukum perda dan perkada

Formulasi indikator yang digunakan untuk menghitung capaian target adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah warga Negara yang mendapatkan layanan akibat dari dampak penegakan hukum perda/perkada}}{\text{Jumlah warga Negara yang terkena dampak penegakan hukum perda/perkada}} \times 100\%$$

Target dari indikator tersebut yang harus dicapai 100 % yang artinya warga yang terkena dampak dari penegakan hukum perda/perkada harus terlayani semua . sampai dengan triwulan IV tahun 2022 ini tidak ada warga Negara yang terkena dampak dari penegakan hukum perda/perkada sehingga capaian dari indikator ini adalah 100%.

Program dan Kegiatan yang Mendukung Pencapaian Indikator Kinerja Program

Adapun program, kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung pencapaian indikator kinerja program dari Bidang Sumber Daya Manusia dan Sarana Prasarana melaksanakan 2 (dua) Kegiatan yang diurai dalam beberapa 6 (enam) Sub Kegiatan.

Berdasarkan perjanjian kinerja dan evaluasi atas rencana aksi yang telah dilakukan secara berjenjang, berikut ini disajikan dalam tabel pengukuran kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Bidang Sumber Daya Manusia dan Sarana Prasarana sampai dengan Triwulan III Tahun 2022.

Tabel.3.6
Capaian Kinerja
Bidang Sumber Daya Manusia Dan Sarana Prasarana
pada Tahun 2022

No	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada	100%		
a.	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	- Persentase SDM Aparatur terlatih - Persentase pemenuhan Sarana dan Prasarana Trantibum			
-	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bermuansa Hak Asasi Manusia	- Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti pelatihan peningkatan Kapsitas - Jumlah Kegiatan Pelatihan peningkatan Kapasitas SDM Satpol PP yang dilaksanakan - Jumlah Satgas Linmas Kabupaten yang mengikuti Pleatihan - Jumlah Kegiatan peningkatan Satlinmas Kabupaten dan Kecamatan yang dilaksanakan - Jumlah Polisi Pamong Praja yang mengikuti Diklat Kompetensi	216 5 128 1 6	418 5 128 1 6	100% 100% 100% 100% 100%

No	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
-	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum	- Jumlah perlengkapan operasional yang diadakan	63	63 unit	100%
		- Jumlah kendaraan operasional yang diadakan	2	2	100%
		- Jumlah gedung/posko trantibum yang diadakan	-		
		- Jumlah sarana dan prasarana ketenteraman dan ketertiban umum yang dipelihara	47 unit	47 unit	100%
	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Jumlah dokumen SOP penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban umum yang disusun/ dimutakhirkan	10	10	100
	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah warga Negara yang terkena dampak Penegakan Perda dan Perkada terlayani	5 orang	0 Orang	100%
	Kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan dan penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	Jumlah kerjasama penyelenggaraan trantibum dan penegakan perda yang dilaksanakan	-	-	-
	Pembinaan Penyidik pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Persentase PPNS yang berkompeten	75%	75%	100%
-	Pengembangan Kapasitas Dan Karier PPNS	- Jumlah PPNS yang mengikuti Diklat pengembangan Kapasitas	3	3	100
		- Jumlah Rakor PPNS yang Dilaksanakan	4	3	75%
		- Jumlah Polisi Pamong Praja yang mengikuti diklat PPNS	0	0	0

Berdasarkan tabel di atas, Bidang Sumber Daya Manusia dan Sarana Prasarana melaksanakan Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dengan menggunakan indikator Warga Negara yang memperoleh

layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada dengan formulasi indikator sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan akibat penegakan hukum perda dan perkada}}{\text{Jumlah warga Negara yang mengalami dampak akibat penegakan hukum Perda dan Perkada}} \times 100\%$$

Target dari indikator tersebut yang harus dicapai pada Tahun 2022 adalah 100.00% dan terealisasi 100.00%, sehingga diperoleh persentase capaian sebesar 100.00%. Realisasi sebesar 100.00% diperoleh dari perhitungan Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan akibat penegakan hukum perda dan perkada sebanyak 0 orang artinya tidak dampak yang ditimbulkan dari kegiatan Penegakan hukum Perda dan Perkada yang dilakukan oleh Satpol PP sehingga dapat disimpulkan capaian kinerjanya sebesar 100%

Capaian Kinerja Kegiatan dan Sub Kegiatan yang mendukung Pencapaian Kinerja Program

Untuk melihat penjabaran capaian kinerja masing-masing kegiatan yang mendukung capaian program akan dijabarkan pada bagian capaian kinerja kegiatan di bawah ini.

Berikut ini penjabaran capaian kinerja Kegiatan dan Sub Kegiatan yang berkontribusi terhadap pencapaian kinerja Program.

1. Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Dalam Satu Daerah Kabupaten/Kota

Bidang Sumber Daya Manusia dan Sarana Prasarana dalam melaksanakan kegiatan ini menggunakan beberapa indikator, yaitu:

- 1) Persentase SDM Aparatur terlatih

Target kegiatan ini adalah 49, 61 % dan teralisasi 49,34% adapun formula yang digunakan untuk mendapatkan persentase SDM terlatih adalah sebagai berikut

$$\frac{\text{Jumlah Aparatur Satpol Yag telah Mengikuti Peningkatan Kapasitas}}{\text{Jumlah Keseluruhan Aparatur Satpol Yang akan mengikuti Peningkatan Kapasitas}} \times 100\%$$

Berdasarkan formula diatas persentase SDM aparatur terlatih yaitu jumlah Aparatur Satpol yang telah mengikuti peningkatan kapasitas sebanyak 225 orang dibagi jumlah keseluruhan aparatur Satpol yang akan mengikuti peningkatan Kapasitas sebanyak 456 Orang jadi diperoleh realisasi 49,34 % dengan capaian 99,45 %

2) Persentase pemenuhan Sarana dan Prasarana Trantibum Minimal

Target Tahun 2022 sebesar 23,99 % yang diupayakan dapat tercapai di Triwulan IV sebagaimana target yang telah ditetapkan dalam rencana aksi.adapun formula yang digunakan untuk menghitung persentase pemenuhan sarana dan prasarana trantibum minimal adalah sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah sarana prasarana yang tersedia}}{\text{Jumlah standar sarana dan prasarana minimal yang dibutuhkan}} \times 100\%$$

Jumlah sarana dan Prasarana yang tersedia pada Satpol PP sampai Triwulan IV Tahun 2022 sebanyak 633 unit sedangkan jumlah sarana dan prasarana trantibum minimal yang dibutuhkan sebanyak 2639 unit sehingga diperoleh realisasi 23,99% dengan capaian 100%

Dalam mendukung pencapaian indikator Program/kegiatan tersebut di atas, Bidang Sumber Daya Manusia telah melaksanakan 3 (Tiga) Sub Kegiatan yaitu:

- 1) Peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia

Pada Sub Kegiatan ini terdapat dua indikator yang mendukung pencapaian sub kegiatan untuk Tahun 2022 yaitu : 1) Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti Pelatihan peningkatan Kapasitas dengan target 538 orang dan terealisasi 415 orang sehingga diperoleh capaian 77,14% .Indikator yang ke 2) Jumlah kegiatan pelatihan peningkatan SDM satpol PP yang dilaksanakan dengan target 3 kegiatan dan untuk triwulan III Tahun 2022 telah terealisasi 3 kegiatan dan indikator yang ke 3). Jumlah Polisi Pamong Praja yang mengikuti diklat Kompetensi sebanyak 6 Orang dari target sampai dengan Triwulan III sebanyak 6 Orang.

- 2) Kerjasama Antar Lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan dan penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum

Indikator pada sub Kegiatan ini adalah jumlah kerjasama penyelenggaraan trantibum dan penegakan perda yang dilaksanakan dengan target sebanyak 2 dokumen namun sampai dengan triwulan IV tdak ada dokumen kerja sama yang dihasilkan. Hal tersebut disebabkan kerjasama yang direncanakan akan dilakukan dengan Pihak RSUD dalam hal pengamanan asset RSUD tetapi belum terjadi kesepakatan kedua pihak dalam hal personil yang akan dilibatkan dan penganggarannya.

- 3) Pengadaan dan pemeliharaan Sarana dan Prasarana ketenteraman dan ketertiban umum

Pada Sub Kegiatan ini terdapat 4 (Empat) indikator yang mendukung pencapaiannya namun untuk triwulan III hanya 3 (Tiga) indikator yang memiliki target yaitu : 1)jumlah perlengkapan operasional yang diadakan sampai dengan target 63 unit dan terealisasi 63 Unit dengan capaian 100%, 2) Jumlah Kendaraan Operasional Yang diadakan sebanyak 2 Unit dan teralisasi 100%, 3)jumlah Sarana dan Prasarana ketenteraman dan ketertiban umum yang dipelihara sebanyak 47 unit dan inipun terealisasi 100%.

- 4) Penyusunan dokumen SOP ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat

Pada sub kegiatan ini target nya adalah tesusunnya 10 dokumen SOP trantibum dan terealisasi 100% pada Triwulan IV Tahun 2022.

- 5) Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

Sub Kegiatan ini merupakan pemenuhan SPM bidang ketenteraman dan ketertiban umum. Setiap warga Negara yang terdampak penegakan hukum Perda dan Perkada baik kerugian material maupun cedera fisik wajib dipenuhi layanannya. Sampai dengan Triwulan IV tidak ada penegakan Perda dan Perkada yang dilakukan oleh Satpol PP yang menimbulkan dampak. Untuk menjaga segala kemungkinan yang bisa saja terjadi maka Bidang SDM dan sarpras menyediakan/mengadakan 5 unit Kotak P3K untuk penanganan awal apabila ada warga negara yang cedera fisik diakibatkan terkena dampak penegakan perda/perkada.

2. Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota

Indicator pada kegiatan ini adalah Persentase PPNS yang berkompeten, saat di Satpol PP didukung oleh 5 (lima) orang PPNS yang aktif dalam melakukan penanganan kasus pelanggaran Perda/Perkada jumlah ini lebih sedikit dibanding tahun sebelumnya yang berjumlah 7(tujuh) orang hal ini disebabkan adanya mutasi Pejabat ke OPD lain.

Dalam mendukung pencapaian indicator program/kegiatan Bidang SDM dan Sarpras, kegiatan ini terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan yaitu:

- 1) Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS

Indikator subkegiatan ini adalah

- Jumlah PPNS yang mengikuti diklat PPNS dengan target 3 Orang dan realisasi kegiatan ini adalah pelaksanaan studi tiru terkait cukai rokok ke Kab. Soppeng yang diikuti oleh 4 orang PPNS Satpol PP.

- Jumlah Rakor PPNS yang dilaksanakan dengan target pada Tahun 2022 sebanyak 4 kegiatan dan telah terealisasi 3 Kegiatan dengan capaian 75%
- Jumlah Polisi Pamong Praja yang mengikuti diklat PPNS dengan target 0 hal ini disebabkan anggaran Satpol PP Tahun 2022 ini belum dapat meng Cover pelaksanaan diklat PPNS.

Permasalahan dan Alternatif Solusi dalam Pencapaian Sasaran Strategis I

Berdasarkan capaian sasaran dan capaian program/kegiatan/sub kegiatan, beberapa kegiatan tidak mencapai target kinerja. Kegagalan atau tidak tercapainya target dalam pencapaian sasaran strategis I dan capaian program/kegiatan pendukungnya disebabkan oleh beberapa permasalahan. Berikut diuraikan faktor-faktor yang menyebabkan kegagalan pencapaian target dan alternatif solusi atau saran perbaikan yang dapat dilakukan dalam memecahkan masalah/kendala tersebut.

Tabel.3.4

Permasalahan/Kendala dalam Pencapaian Sasaran Strategis I dan Alternatif Solusinya

No	Permasalahan/Kendala	Solusi/Saran Perbaikan
1	Kapasitas dan Kompetensi Aparatur Pol PP; Kapasitas Aparatur Pol PP masih terbatas, pejabat fungsional Pol PP sangat kurang, dan keberadaan tenaga bantu Pol PP (upah jasa) sangat terbatas dalam hal kompetensi dan pengetahuan penegakan Perda. Penempatan personil Satpol PP di Kecamatan adalah tenaga bantu (upah jasa) hanya didampingi oleh 1 (satu) orang PNS Satpol PP sebagai Koordinator memiliki kompetensi yang sangat terbatas, terutama dalam hal pemahaman aturan dan cara komunikasi dengan masyarakat.	Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Aparatur Satpol PP melalui Pendidikan dan Pelatihan. PNS pelaksana Satpol PP diikutkan untuk Diklat Jabatan Fungsional Pol PP dan Diklat PPNS bagi PNS yang memenuhi syarat. Anggota Satpol PP Non-PNS (upah jasa) diberikan program pelatihan-pelatihan kepamongprajaan agar dapat meningkatkan kemampuan membantu tugas pokok Satpol PP dalam penegakan Perda.

No	Permasalahan/Kendala	Solusi/Saran Perbaikan
2.	Koordinasi Pelaksanaan Perda; Lemahnya koordinasi pelaksanaan dan pengawasan Peraturan Daerah oleh pengampu Perda, OPD pengampu Perda masih menganggap bahwa penanggung-jawab sepenuhnya dalam penegakan Perda adalah Satpol PP, berdasarkan Permendagri 54 Tahun 2011 tentang SOP Satpol PP, OPD mempunyai tanggung jawab pelaksanaan Perda yang diampunya, melalui sosialisasi Perda kepada masyarakat, menyiapkan sarana-prasarana pendukung, memberikan teguran jika terjadi pelanggaran, jika tegurannya tidak diindahkan barulah limpahkan ke Satpol PP.	Melaksanakan Rakor Penegakan Perda dengan pokok bahasan tanggungjawab OPD dalam penegakan dan pengawasan Perda. Membentuk Tim Penegakan Perda sesuai dengan jenis Perda yang ditegakkan Meminta kepada OPD pengampu Perda agar meningkatkan intensitas sosialisasi kepada masyarakat karena kurangnya sosialisasi dan ketidaktahuan sering menjadi alasan warga masyarakat melanggar ketentuan Perda. OPD menyiapkan sarana dan prasarana pendukung dalam penegakan Perda.
3	Kerjasama Penindakan Pelanggaran Perda dan Dukungan Pihak Terkait; Kinerja Satpol PP dalam penegakan Perda juga dipengaruhi oleh dukungan pihak kepolisian dan kejaksaan serta pihak Pengadilan Negeri. Dukungan Kepolisian dalam bentuk back-up kegiatan operasional dan sebagai korwas PPNS, kejaksaan sebagai pelaksana putusan Pengadilan dalam perkara pelanggaran Perda, dan dukungan Pengadilan untuk menyidangkan perkara pelanggaran Perda serta kesediaan untuk operasi yustisi lapangan.	Meningkatkan kerjasama dan koordinasi dengan pihak kepolisian dan kejaksaan dalam penanganan Pelanggaran Peraturan Daerah. Pelaksanaan Nota Kesepahaman (MoU) penanganan Pelanggaran Perda antara Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dengan Kejaksaan Negeri Luwu Timur dan Kepolisian Resort Luwu Timur No yang telah disepakati pada 28 Oktober 2018 agar lebih optimal segera berkoordinasi dengan Pejabat Penghubung untuk menyusun petunjuk teknis pelaksanaan MoU.
4	Substansi Peraturan Daerah; masih banyak Peraturan Daerah yang belum operasional atau belum ditindaklanjuti dengan Peraturan Pelaksanaan (Peraturan Bupati). Hal ini seringkali menjadi hambatan dalam penanganan pelanggaran Perda.	Menginventaris seluruh peraturan daerah yang memuat sanksi untuk selanjutnya dikoordinasikan dengan OPD pengampu, menyampaikan agar segera menindaklanjuti Peraturan Pelaksanaan yang diamanatkan oleh ketentuan Perda.
5	Operasional, Sarana dan Prasarana Patroli; Anggaran Operasional untuk Kegiatan Patroli Tahun 2022 ini sangat minim sehingga capaian target sangat rendah Selain itu, Satpol PP di Kecamatan masih menumpang di kantor camat, untuk kinerja yang lebih maksimal agar dapat memiliki posko trantibum sendiri yang letaknya berada disekitar fasilitas umum yang menjadi pusat keramaian (massa). Mobil operasional di setiap kecamatan, saat ini anggota dalam melakukan patroli menggunakan kendaraan pribadi.	Melakukan koordinasi kepada TAPD dan DPRD agar lebih memperhatikan dukungan anggaran untuk pelaksanaan urusan Trantibumlinmas yang merupakan urusan wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Sehingga dengan dukungan anggaran yang memadai dapat dilakukan kegiatan patroli yang maksimal dan Pengadaan Sarana dan Prasarana operasional sesuai dengan Standar pelayanan.
6	Kurangnya Sosialisasi Perda; Alasan ketidaktahuan dan tidak pernah	Meningkatkan koordinasi dengan OPD pengampu Perda agar lebih intens

No	Permasalahan/Kendala	Solusi/Saran Perbaikan
	disosialisasikan seringkali menjadi alasan seseorang warga masyarakat melanggar aturan Perda.	dalam mensosialisasikan Perda
7	Peran dan keterlibatan Satlinmas masih dianggap belum penting Beberapa Desa masih menganggap peran Satlinmas dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat masih dianggap belum penting sehingga kurang perhatian.	Selalu melakukan monitoring terkait keterlibatan Satlinmas dalam pelaksanaan tugasnya dan berkoordinasi dengan Kepala Desa. Perlu dibuat lomba Siskamling untuk merangsang minat Kepala Desa dan mengubah image Masyarakat menjadi Satlinmas

2. Sasaran Strategis II (SS2)

Meningkatnya Kualitas dan Pencapaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Perangkat Daerah

Pada sasaran strategis II (SS2) yang merupakan Sasaran penunjang urusan diukur dengan indicator Persentase Capaian Kinerja Program perangkat Daerah . SS2 ini merupakan salah satu upaya untuk mencapai misi mengimplementasikan good governance (tata kelola pemerintahan yang baik) dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) aparatur dalam mewujudkan pelayanan umum yang Prima.

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN PENUNJANG URUSAN YANG BERKONTRIBUSI TERHADAP PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS II (SS2)

Berikut ini dijabarkan Capaian masing-masing Program dan capaian kinerja Kegiatan/Sub Kegiatan yang menunjang pencapaian target kinerja program pada Tahun 2022, yaitu:

1. KEGIATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH

- a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Target kinerja sub kegiatan yaitu Jumlah dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu, dengan target sebanyak 2 dokumen. dan terealisasi sebanyak 2 dokumen yaitu tersusunnya dokumen Renja Tahun 2023 dan Renja Perubahan Tahun 2022.

- b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
Target kinerja sub kegiatan yaitu Jumlah dokumen RKA-SKPD yang disusun tepat waktu, dengan target sebanyak 1 dokumen dan terealisasi 100% yaitu penyusunan RKA Satpol PP Tahun 2023 pada Triwulan IV Tahun 2022.
- c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
Target kinerja sub kegiatan yaitu Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD yang disusun tepat waktu, dengan target sebanyak 1 dokumen dan terealisasi 100% yaitu penyusunan Perubahan RKA Satpol PP Tahun 2022.
- d. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
Target kinerja sub kegiatan yaitu Jumlah dokumen DPA-SKPD yang disusun tepat waktu, dengan target sebanyak 1 dokumen yaitu dokumen DPA Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2022. Target telah terealisasi pada Triwulan I ini dengan capaian 100%.
- e. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
Target kinerja sub kegiatan yaitu Jumlah dokumen DPA-SKPD yang disusun tepat waktu, dengan target sebanyak 1 dokumen yaitu dokumen Perubahan DPA Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2022 dan telah teralisasi 100%.
- f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian kinerja dan ikhtisar realisasi Kinerja yang disusun
Target Kinerja sub kegiatan ini adalah jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang disusun dengan target sebanyak 3 dokumen dan telah terealisasi 100% adapun dokumen yang dimaksud yaitu:
- 1) LKPJ 2021
 - 2) LPPD 2021
 - 3) LAKIP 2021
- g. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Target kinerja sub kegiatan adalah Jumlah laporan kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu, dengan target

sebanyak 8 dokumen. Adapun target yang direncanakan pada tahun 2022 yaitu tersusunnya 6 dokumen yaitu

- 1) Dokumen Evaluasi Kinerja TW IV TA. 2021
- 2) Dokumen Monev Renja TW IV TA. 2021
- 3) Dokumen Evaluasi Kinerja TW I TA. 2022
- 4) Dokumen Monev Renja TW I TA. 2022
- 5) Dokumen evaluasi TW II TA. 2022
- 6) Dokumen Monev Renja TW II. TA. 2022
- 7) Dokumen Evaluasi TW. III Ta. 2022
- 8) Dokumen Monev. Renja Triwulan III. TA. 2022

Seluruh dokumen telah tersusun sehingga diperoleh capaian kinerja 100%

2. KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH

a. Penyediaan Gaji Dan Tunjangan Asn

Target output adalah terbayarnya gaji dan tunjangan ASN sebanyak 39 orang dan terealisasi 39 orang . dengan capaian 100%.

b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

Target output adalah terbayarnya honorarium penanggung jawab pengelola keuangan setiap bulan selama setahun. Adapun yang dimaksud penanggungjawab pengelola keuangan adalah:

- 1) Bendahara Pengeluaran
- 2) Bendahara Penerimaan
- 3) Pejabat Pengadaan barang/jasa

Dan sub kegiatan ini berjalan sesuai dengan rencana setiap bulan.

c. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/verifikasi keuangan SKPD

Output subkegiatan ini adalah penyelesaian dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD yang dilaksanakan oleh

pejabat penatausahaan Keuangan (PPK) dan telah terealisasi sesuai target triwulan IV Tahun 2022 sebesar 100%

- d. Koordinasi dan penyusunan Laporan keuangan Akhir Tahun SKPD
Output Subkegiatan ini adalah terselesaikannya laporan keuangan akhir tahun SKPD dengan target 1 dokumen dan terealisasi 100%.
- e. Pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan
Output subkegiatan ini adalah tersedianya dokumen laporan tanggapan pemeriksaan dengan target adalah 2 dokumen dan telah terealisasi 100 %
- f. **Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran Skpd**

Target kinerja sub kegiatan adalah Jumlah laporan keuangan perangkat daerah yang disusun tepat waktu, dengan target sebanyak 12 dokumen. Adapun target sampai dengan triwulan IV TA. 2022 yaitu 12 dokumen yang telah terealisasi 100%.

3. KEGIATAN ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH

a. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah

Target kinerja subkegiatan ini adalah tersusunnya dokumen perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD yang direncanakan pelaksanaannya sampai Triwulan IV dengan target 2 dokumen. Yaitu Dokumen RKBMD 2023 dan RKBMD Perubahan Tahun 2022.

b. Rekonsiliasi dan penyusunan laporan Barang Milik Daerah pada SKPD

Target kinerja subkegiatan ini adalah dokumen rekonsiliasi Barang Milik Daerah pada SKPD dengan target sebanyak 1 dokumen dan telah terealisasi 100%

c. Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD

Target kinerja sub kegiatan adalah Jumlah laporan penatausahaan BMD SKPD yang disusun tepat waktu dengan

target sebanyak 4 dokumen. Adapun target s.d triwulan IV TA. 2022 yaitu 4 dokumen dan telah terealisasi Laporan penatausahaan BMD sebanyak 3 dokumen dan terealisasi 100%.

4. KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH

a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya

Jumlah pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya yang diadakan sebanyak 266 berupa pakaian olah raga telah terealisasi 100% dan pada Perubahan DPA 2022 terdapat penambahan pakaian dinas untuk PDU sebanyak 13 Pasang dan PDL sebanyak 35 Stel dan terealisasi 100 % pada Triwulan IV tahun 2022.

b. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian

Jumlah laporan data administrasi kepegawaian yang dimutakhirkan ditargetkan sampai Triwulan IV sebanyak 4 dokumen laporan dari target 4 dokumen dan telah terealisasi 100%

c. Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai

Jumlah dokumen laporan hasil monitoring evaluasi dan penilaian kinerja pegawai yang dilaksanakan sampai triwulan IV sebanyak 12 dokumen dan terealisasi 12 dokumen (100%)

d. Pendidikan dan pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan Fungsi

Sub kegiatan ini di hapus pada perubahan DPA Satpol TA. 2022, di sebabkan Provinsi sebagai pelaksana diklat membatalkan kegiatan karena jumlah peserta dari Kab/Kota tidak memenuhi kuota.

e. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan

Jumlah ASN yang mendapatkan sosialisasi peraturan perundang-undangan sebanyak ditargetkan 42 orang dan yang telah teralisasi sebanyak 42 orang sampai dengan Triwulan IV.

f. **Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan**

Jumlah ASN yang mengikuti Bimbingan Teknis setelah perubahan APBD TA. 2022 ditargetkan sebanyak 7 orang sampai dengan Triwulan IV, dan telah terealisasi 7 orang.

5. **KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH**

a. **Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor**

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor direalisasikan 166 komponen dari 166 jenis komponen yang ditargetkan selama setahun. realisasi untuk triwulan IV sesuai dengan target Sehingga capaian target mencapai 100%.

b. **Penyediaan Peralatan Perangkat Rumah Tangga**

Target Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan sebanyak 169 unit. Sampai dengan triwulan IV target sebanyak 169 unit terealisasi 100% .

c. **Penyediaan Bahan Logistik Kantor**

Target kinerja sub kegiatan adalah Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan, dengan target 10 jenis setiap triwulan. Adapun realisasi s.d triwulan IV TA. 2022 yaitu 10 jenis.

d. **Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan**

Target kinerja sub kegiatan adalah Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan, dengan target 10 jenis setiap triwulan. Adapun realisasi triwulan IV TA. 2022 yaitu 10 jenis

e. **Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan**

Target kinerja sub kegiatan adalah Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan, dengan target 72 exp . Adapun target s.d triwulan IV TA. 2022 sebanyak 72 exp.

f. Fasilitas Kunjungan Tamu

Target kinerja sub kegiatan adalah Jumlah tamu yang difasilitasi kunjungannya, dengan target sampai dengan triwulan IV sebanyak 180 org. Sub kegiatan ini bersifat disediakan jadi realisasi tergantung kepada jumlah tamu yang berkunjung sampai dengan Triwulan IV sebanyak 180 orang yang telah terealisasi.

g. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Target kinerja sub kegiatan adalah Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diikuti, dengan target sebanyak 384 kali dan terealisasi 384 kali.

6. KEGIATAN PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH

a. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Target jumlah peralatan dan mesin kantor yang diadakan sebanyak 36 unit. dan pada Tahun 2022 telah teralisasi sebanyak 5 unit.

b. Pengadaan sarana dan Prasarana pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Target dari sub kegiatan ini adalah Penataan Halaman Parkir dan taman Kantor Satpol PP dan kemajuan fisiknya sampai dengan Triwulan IV adalah 100 %

7. KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

i. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Sub Kegiatan penyediaan jasa surat menyurat menargetkan jumlah surat masuk dan surat keluar yang diagendakan sebanyak 2500 surat dan terealisasi sebanyak 2500 surat.

ii. **Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik**

Sub Kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dengan indikator jumlah rekening bulanan jasa komunikasi, air dan listrik yang dibayarkan Tahun 2022 menargetkan 21 rekening setiap triwulan dan terealisasi 100,00%.

iii. **Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor**

Sub kegiatan penyediaan jasa pelayanan umum kantor menargetkan jumlah jasa tenaga pelayanan umum kantor yang disediakan awalnya sebanyak 2 orang namun 1 orang mengundurkan diri dan pada Perubahan DPA TA. 2022 dianggarkan 1 orang dan terealisasi sesuai target.

8. **KEGIATAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**

a. **Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan**

Target jumlah kendaraan dinas jabatan yang dipelihara sebanyak 1 unit yaitu kendaraan kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, sedangkan untuk kendaraan lainnya dipelihara melalui sub kegiatan pemeliharaan kendaraan operasional atau lapangan.

b. **Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas operasional atau lapangan**

Jumlah kendaraan dinas operasional yang dimiliki oleh Satpol PP sampai saat ini sebanyak 26 Unit yang terdiri dari:

- 1) Mobil Truk Dalmas 1 Unit
- 2) Mobil Patroli 2 Unit
- 3) Mobil Pamwal 1 Unit
- 4) Motor Patroli 9 Unit
- 5) Motor Operasional Satpol PP Kecamatan 11 Unit
- 6) Motor Pamwal 2 Unit

Seluruh kendaraan operasional atau lapangan tersebut dipelihara secara rutin dan dapat digunakan dalam operasional.

c. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang ditargetkan untuk dipelihara pada triwulan IV sebanyak 100 unit yang terdiri dari target sebanyak 100 unit dari Peralatan Kantor berupa TV, Mesin babat, genset, Mebel, Personal Komputer, Printer, dan AC. Peralatan tersebut dapat digunakan dengan baik .

d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Jumlah gedung kantor dan/atau bangunan lainnya yang dipelihara atau rehabilitasi sebanyak 2 unit dan sampai pada Triwulan IV realisasi sebanyak 2 unit

e. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara sebanyak 7 jenis yang terdiri dari Pagar, Halaman, Taman, Jalan, Parkiran, papan Nama Kantor, dan sarpras pendukung lainnya, untuk proses pemeliharaan pada triwulan IV telah teralisasi sebanyak 100 %

3.2. REALISASI ANGGARAN

Total anggaran Belanja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022 setelah Perubahan DPA sebesar Rp12.074.299.907,- yang terdiri dari Belanja Program Penunjang Urusan sebesar Rp.5.560.355.854- Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum sebesar Rp 6.513.944.053,- , Target sampai Triwulan IV sebesar Rp12.074.299.907 dan Realisasi Total Belanja sampai Triwulan IV sebesar Rp 11.911.575.265,- (98,65%).

Berikut tabel rincian realisasi Anggaran Program Kegiatan sampai dengan Triwulan IV beserta Permasalahannya

Realisasi Keuangan
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur
Tahun Anggaran 2022

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	NAMA PENANGGUNG JAWAB MASING-MASING KEGIATAN (PPK/PPPTK)	JUMLAH ANGGARAN	TARGET SAMPAI TRIWULAN IV (BERDASARKAN ANGGARAN KAS)	REALISASI ANGGARAN S.D 31 Desember 2022		SELISIH		TOTAL SISA ANGGARAN		PERMASALAHAN/ KENDAL A
					Rp	%	Rp	%	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7 = (6/5*100)	8=5-6	9=(8/5*100)	10=4-6	11=(10/4*100)	12
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		5.560.355.854	5.560.355.854	5.467.351.861	98,33	93.003.993	1,67	93.003.993	1,67	
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	MUHAMMAD SALMAN, S.STP, M.Si	122.426.867	122.426.867	117.824.695	96,24	4.602.172	3,76	4.602.172	3,76	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	MUHAMMAD SALMAN, S.STP, M.Si	28.721.125	28.721.125	28.216.130	98,24	504.995	1,76	504.995	1,76	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	MUHAMMAD SALMAN, S.STP, M.Si	2.735.980	2.735.980	2.395.000	87,54	340.980	12,46	340.980	12,46	terdapat jenis ATK yang nilainya di DPA tidak

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	NAMA PENANGGUNG JAWAB Masing-Masing Kegiatan (PPK/PPPTK)	JUMLAH ANGGARAN	TARGET SAMPAI TRIWULAN IV (BERDASARKAN ANGGARAN KAS)	REALISASI ANGGARAN S.D 31 Desember 2022		SELISIH		TOTAL SISA ANGGARAN		PERMASALAHAN/KENDAL A
					Rp	%	Rp	%	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7 = (6/5*100)	8=5-6	9=(8/5*100)	10=4-6	11=(10/4*100)	12
											sesuai dengan yang ada di E-catalog
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	MUHAMMAD SALMAN, S.STP, M.Si	2.904.150	2.904.150	2.565.000	88,46	335.150	11,54	335.150	11,54	terdapat jenis ATK yang nilainya di DPA tidak sesuai dengan yang ada di E-catalog
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	MUHAMMAD SALMAN, S.STP, M.Si	2.265.980	2.265.980	2.265.980	100,00	0	0,00	0	0,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen perubahan DPA-SKPD	MUHAMMAD SALMAN, S.STP, M.Si	2.535.980	2.535.980	2.535.980	100,00	0	0,00	0	0,00	
	Koordinasi dan Penyusunan laporan capaian kinerja dan	MUHAMMAD SALMAN, S.STP, M.Si	35.461.960	35.461.960	33.171.160	93,54	2.290.800	6,46	2.290.800	6,46	terdapat anggaran belanja

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	NAMA PENANGGUNG JAWAB MASING-MASING KEGIATAN (PPK/PPTK)	JUMLAH ANGGARAN	TARGET SAMPAI TRIWULAN IV (BERDASARKAN ANGGARAN KAS)	REALISASI ANGGARAN S.D 31 Desember 2022		SELISIH		TOTAL SISA ANGGARAN		PERMASALAHAN/KENDAL A
					Rp	%	Rp	%	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7 = (6/5*100)	8=5-6	9=(8/5*100)	10=4-6	11=(10/4*100)	12
	Ikhtisar realisasi kinerja SKPD										perjalanan dinas yang dibelanjakan kurang dari standar biaya di dalam DPA
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	MUHAMMAD SALMAN,S.STP,M.Si	47.801.692	47.801.692	46.671.445	97,64	1.130.247	2,36	1.130.247	2,36	terdapat jenis ATK yang nilainya di DPA tidak sesuai dengan yang ada di E-catalog
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	MUHAMMAD SALMAN,S.STP,M.Si	3.929.381.333	3.929.381.333	3.896.298.420	99,16	33.082.913	0,84	33.082.913	0,84	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	MUHAMMAD SALMAN,S.STP	3.843.647.663	3.843.647.663	3.812.875.780	99,20	30.771.883	0,80	30.771.883	0,80	dilakukan across

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	NAMA PENANGGUNG JAWAB MASING-MASING KEGIATAN (PPK/PPPTK)	JUMLAH ANGGARAN	TARGET SAMPAI TRIWULAN IV (BERDASARKAN ANGGARAN KAS)	REALISASI ANGGARAN S.D 31 Desember 2022		SELISIH		TOTAL SISA ANGGARAN		PERMASALAHAN/ KENDAL A
					Rp	%	Rp	%	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7 = (6,5*100)	8=5-6	9=(8,5*100)	10=4-6	11=(10/4*100)	12
		M.Si									gaji sebesar 2,5 % dan adanya pemotongan Tpp berdasarkan hasil rekapitulasi presensi PNS setiap bulan
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	MUHAMMAD SALMAN,S.STP M.Si	21.960.000	21.960.000	21.560.000	98,18	400.000	1,82	400.000	1,82	pembayaran honor Pejabat Pengadaaan pada bulan Januari tidak dibayarkan dikarenakan

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	NAMA PENANGGUNG JAWAB MASING-MASING KEGIATAN (PPK/PPPTK)	JUMLAH ANGGARAN	TARGET SAMPAI TRIWULAN IV (BERDASARKAN ANGGARAN KAS)	REALISASI ANGGARAN S.D 31 Desember 2022		SELISIH		TOTAL SISA ANGGARAN		PERMASALAHAN/KENDAL A
					Rp	%	Rp	%	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7 = (6/5*100)	8=5-6	9=(8/5*100)	10=4-6	11=(10/4*100)	12
											an belum berjalannya kegiatan pengadaan di bulan Januari
	Pelaksanaan Penelaahan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	MUHAMMAD SALMAN, S.STP, M.Si	17.446.350	17.446.350	17.440.400	99,97	5.950	0,03	5.950	0,03	
	Kordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	MUHAMMAD SALMAN, S.STP, M.Si	27.713.760	27.713.760	27.636.640	99,72	77.120	0,28	77.120	0,28	
	Pengelolaan dan bahan tanggapan Pemeriksaan	MUHAMMAD SALMAN, S.STP, M.Si	2.574.960	2.574.960	2.549.200	99,00	25.760	1,00	25.760	1,00	
	Kordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD	MUHAMMAD SALMAN, S.STP, M.Si	16.038.600	16.038.600	14.236.400	88,76	1.802.200	11,24	1.802.200	11,24	terdapat belanja makan minum rapat melalui sistem pemesanan

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	NAMA PENANGGUNG JAWAB MASING-MASING KEGIATAN (PPK/PPPTK)	JUMLAH ANGGARAN	TARGET SAMPAI TRIMULAN IV (BERDASARKAN ANGGARAN KAS)	REALISASI ANGGARAN S.D 31 Desember 2022		SELISIH		TOTAL SISA ANGGARAN		PERMASALAHAN/KENDAL A
					Rp	%	Rp	%	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7 = (6/5*100)	8=5-6	9=(8/5*100)	10=4-6	11=(10/4*100)	12
											n e- catalog yang mengharuskan penyedia dan pejabat pengadaan harus selalu standby dan kendala jaringan yang membuat sulit melakukan transaksi
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	MUHAMMAD SALMAN,S.STP M.Si	32.329.006	32.329.006	31.857.255	98,54	471.751	1,46	471.751	1,46	

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	NAMA PENANGGUNG JAWAB MASING-MASING KEGIATAN (PPK/PPPTK)	JUMLAH ANGGARAN	TARGET SAMPAI TRIWULAN IV (BERDASARKAN ANGGARAN KAS)	REALISASI ANGGARAN S.D 31 Desember 2022		SELISIH		TOTAL SISA ANGGARAN		PERMASALAHAN/ KENDAL A
					Rp	%	Rp	%	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7 = (6/5*100)	8=5-6	9=(8/5*100)	10=4-5	11=(10/4*100)	12
	Penyusunan perencanaan kebutuhan barang milik Daerah SKPD	MUHAMMAD SALMAN, S.STP, M.Si	5.778.980	5.778.980	5.651.280	97,79	127.700	2,21	127.700	2,21	terdapat anggaran belanja perjalanan dinas yang dibelanjakan kurang dari standar biaya di dalam DPA
	Rekonsiliasi dan penyusunan Laporan Barang milik Daerah	MUHAMMAD SALMAN, S.STP, M.Si	9.890.980	9.890.980	9.696.220	98,03	194.760	1,97	194.760	1,97	terdapat anggaran belanja perjalanan dinas yang dibelanjakan kurang dari standar biaya di dalam

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	NAMA PENANGGUNG JAWAB MASING-MASING KEGIATAN (PPK/PPPTK)	JUMLAH ANGGARAN	TARGET SAMPAI TRIWULAN IV (BERDASARKAN ANGGARAN KAS)	REALISASI ANGGARAN S.D 31 Desember 2022		SELISIH		TOTAL SISA ANGGARAN		PERMASALAHAN/ KENDAL A
					Rp	%	Rp	%	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7 = (6/5*100)	8=5-6	9=(8/5*100)	10=4-6	11=(10/4*100)	12
											DPA sehingga terdapat sisa
	Penelausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	MUHAMMAD SALMAN,S.STP ,M.Si	16.659.046	16.659.046	16.509.755	98,10	149.291	0,90	149.291	0,90	
	Administrasi Kepengawalan Perangkat Daerah		303.657.098	303.657.098	291.077.187	95,86	12.579.911	4,14	12.579.911	4,14	
	Pengadaan Paksi Dinas Beserta Abtribut Kelengkapannya	INDRA FAWZY,S.IP,M.Si	218.640.000	218.640.000	215.815.370	98,71	2.824.630	1,29	2.824.630	1,29	realisasi menyesaikan nilai kontrak dan penawaran oleh rekanan
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepengawalan	MUHAMMAD SALMAN,S.STP ,M.Si	7.629.688	7.629.688	6.360.592	83,37	1.269.096	16,63	1.269.096	16,63	terdapat jenis ATK yang nilainya di DPA tidak sesuai dengan

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	NAMA PENANGGUNG JAWAB MASING-MASING KEGIATAN (PPK/PPTK)	JUMLAH ANGGARAN	TARGET SAMPAI TRIWULAN IV (BERDASARKAN ANGGARAN KAS)	REALISASI ANGGARAN S.D 31 Desember 2022		SELISIH		TOTAL SISA ANGGARAN		PERMASALAHAN/ KENDAL A
					Rp	%	Rp	%	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7 = (6,5*100)	8=5-6	9=(8,5*100)	10=4-6	11=(10/4*100)	12
											yang ada di E-catalog
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	MUHAMMAD SALMAN, S.STP, M.Si	21.647.410	21.647.410	21.199.150	97,93	448.260	2,07	448.260	2,07	terdapat jenis ATK yang nilainya di DPA tidak sesuai dengan yang ada di E-catalog
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	MUHAMMAD SALMAN, S.STP, M.Si	-	0	0	0,00	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	ng karena pelaksanaan Diklat membatalkan kegiatan pelatihan dikarenakan jumlah peserta tidak

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	NAMA PENANGGUNG JAWAB MASING-MASING KEGIATAN (PPK/PPPTK)	JUMLAH ANGGARAN	TARGET SAMPAI TRIWULAN IV (BERDASARKAN ANGGARAN KAS)	REALISASI ANGGARAN S.D 31 Desember 2022		SELISIH		TOTAL SISA ANGGARAN		PERMASALAHAN/ KENDAL A
					Rp	%	Rp	%	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7 = (6/5*100)	8=5-6	9=(8/5*100)	10=4-6	11=(10/4*100)	12
											mencapai kuota
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	MUHAMMAD SALMAN, S.STP, M.Si	7.250.000	7.250.000	5.350.000	73,79	1.900.000	26,21	1.900.000	26,21	terdapat belanja honorarium narasumber yang tidak terealisasi karena terbatasnya narasumber dari instansi pengirim
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	MUHAMMAD SALMAN, S.STP, M.Si	48.490.000	48.490.000	42.352.075	87,34	6.137.925	12,66	6.137.925	12,66	anggaran ini sifatnya disediakan dan digunakan sesuai ketentuan penyeleng

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	NAMA PENANGGUNG JAWAB MASING-MASING KEGIATAN (PPK/PPTK)	JUMLAH ANGGARAN	TARGET SAMPAI TRIWULAN IV (BERDASARKAN ANGGARAN KAS)	REALISASI ANGGARAN S.D 31 Desember 2022		SELISIH		TOTAL SISA ANGGARAN		PERMASALAHAN/ KENDAL A
					Rp	%	Rp	%	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7 = (6/5*100)	8=5-6	9=(8/5*100)	10=4-6	11=(10/4*100)	12
											gara Bimtek
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		470.513.650	470.513.650	465.318.101	98,90	5.195.549	1,10	5.195.549	1,10	
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	MUHAMMAD SALMAN, S.STP M.Si	8.217.400	8.217.400	8.217.400	100,00	0	0,00	0	0,00	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	MUHAMMAD SALMAN, S.STP M.Si	10.917.000	10.917.000	10.917.000	100,00	0	0,00	0	0,00	
	Penyediaan bahan logistik kantor	MUHAMMAD SALMAN, S.STP M.Si	5.744.000	5.744.000	5.737.000	99,88	7.000	0,12	7.000	0,12	
	Penyediaan barang cetakan dan pengandaan	MUHAMMAD SALMAN, S.STP M.Si	11.430.000	11.430.000	9.441.500	82,60	1.988.500	17,40	1.988.500	17,40	anggaran ini sifatnya disedak n dan di gunakan untuk memenuhi kebutuhan barang cetakan

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	NAMA PENANGGUNG JAWAB MASING-MASING KEGIATAN (PPK/PPPTK)	JUMLAH ANGGARAN	TARGET SAMPAI TRIWULAN IV (BERDASARKAN ANGGARAN KAS)	REALISASI ANGGARAN S.D 31 Desember 2022		SELISIH		TOTAL SISA ANGGARAN		PERMASALAHAN/KENDAL A
					Rp	%	Rp	%	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7 = (6/5*100)	8=5-6	9=(8/5*100)	10=4-6	11=(10/4*100)	12
											dan penggantian
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	MUHAMMAD SALMAN, S.STP, M.Si	7.800.000	7.800.000	6.360.000	81,54	1.440.000	18,46	1.440.000	18,46	dibayarkan sesuai tagihan koran
	Facilitasi Kunjungan Tamu	MUHAMMAD SALMAN, S.STP, M.Si	8.100.000	8.100.000	8.100.000	100,00	0	0,00	0	0,00	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	MUHAMMAD SALMAN, S.STP, M.Si	418.305.250	418.305.250	416.545.201	99,58	1.760.049	0,42	1.760.049	0,42	terdapat anggaran belanja perjalanan dinas yang dibelanjakan kurang dari standar biaya di dalam DPA sehingga terdapat

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	NAMA PENANGGUNG JAWAB MASING-MASING KEGIATAN (PPK/PPTK)	JUMLAH ANGGARAN	TARGET SAMPAI TRIWULAN IV (BERDASARKAN ANGGARAN KAS)	REALISASI ANGGARAN S.D 31 Desember 2022		SELISIH		TOTAL SISA ANGGARAN		PERMASALAHAN/KENDAL A
					Rp	%	Rp	%	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7 = (6/5*100)	8=5-6	9=(8/5*100)	10=4-6	11=(10/4*100)	12
											sisa
	Pengadaan Barang Milik Daerah, Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	MUHAMMAD SALMAN, S.STP, M.Si	355.250.000	355.250.000	339.273.258	95,22	16.976.742	4,78	16.976.742	4,78	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	INDRA FAWZY, S.IP, M.Si	225.250.000	225.250.000	209.326.960	92,93	15.923.040	7,07	15.923.040	7,07	realisasi sesuai harga dalam e-catalog atau dari rekaman
	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	INDRA FAWZY, S.IP, M.Si	130.000.000	130.000.000	128.946.298	99,19	1.053.702	0,81	1.053.702	0,81	realisasi sesuai nilai kontrak
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		99.237.900	99.237.900	88.774.985	89,46	10.462.915	10,54	10.462.915	10,54	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	MUHAMMAD SALMAN, S.STP, M.Si	11.485.400	11.485.400	10.380.025	90,38	1.105.375	9,62	1.105.375	9,62	terdapat jenis ATK yang

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	NAMA PENANGGUNG JAWAB MASING-MASING KEGIATAN (PPK/PPPTK)	JUMLAH ANGGARAN	TARGET SAMPAI TRIWULAN IV (BERDASARKAN ANGGARAN KAS)	REALISASI ANGGARAN S.D 31 Desember 2022		SELISIH		TOTAL SISA ANGGARAN		PERMASALAHAN/KENDAL A
					Rp	%	Rp	%	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7 = (6/5*100)	8=5-6	9=(8/5*100)	10=4-6	11=(10/4*100)	12
											harga satuannya berbeda dengan yang ada dalam e-Catalog
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	MUHAMMAD SALMAN, S.STP, M.Si	66.502.500	66.502.500	60.582.466	91,10	5.920.034	8,90	5.920.034	8,90	Realisasi menyesuaikan dengan tagihan rekening.
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	MUHAMMAD SALMAN, S.STP, M.Si	21.250.000	21.250.000	17.812.494	83,82	3.437.506	16,18	3.437.506	16,18	terdapat satu tenaga upah jasa cleaning service mengundurkan diri
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan		247.560.000	247.560.000	237.927.960	96,11	9.632.040	3,89	9.632.040	3,89	

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	NAMA PENANGGUNG JAWAB MASING-MASING KEGIATAN (PPK/PPTK)	JUMLAH ANGGARAN	TARGET SAMPAI TRIWULAN IV (BERDASARKAN ANGGARAN KAS)	REALISASI ANGGARAN S.D 31 Desember 2022		SELISIH		TOTAL SISA ANGGARAN		PERMASALAHAN/ KENDAL A
					Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7 = (6/5*100)	8=5-6	9=(8/5*100)	10=4-6	11=(10/4*100)	12
	Daerah										
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	MUHAMMAD SALMAN, S.STP, M.Si	15.100.000	15.100.000	14.476.250	95,87	623.750	4,13	623.750	4,13	realisasi pajak kendaraan dibayarkan sesuai tagihan
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	MUHAMMAD SALMAN, S.STP, M.Si	119.600.000	119.600.000	119.238.710	99,70	361.290	0,30	361.290	0,30	realisasi pajak kendaraan dibayarkan sesuai tagihan
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	MUHAMMAD SALMAN, S.STP, M.Si	53.460.000	53.460.000	49.485.000	92,56	3.975.000	7,44	3.975.000	7,44	anggaran ini sifatnya disediakan dan terealisasi berdasarkan tagihan pemeliharaan

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	NAMA PENANGGUNG JAWAB MASING-MASING KEGIATAN (PPK/PPPTK)	JUMLAH ANGGARAN	TARGET SAMPAI TRIWULAN IV (BERDASARKAN ANGGARAN KAS)	REALISASI ANGGARAN S.D 31 Desember 2022		SELISIH		TOTAL SISA ANGGARAN		PERMASALAHAN/KENDAL A
					Rp	%	Rp	%	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7 = (6/5*100)	8=5-6	9=(8/5*100)	10=4-6	11=(10/4*100)	12
											aan dari rekanan
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	MUHAMMAD SALMAN, S.STP, M.Si	30.600.000	30.600.000	30.298.000	99,01	302.000	0,99	302.000	0,99	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	MUHAMMAD SALMAN, S.STP, M.Si	28.800.000	28.800.000	24.430.000	84,83	4.370.000	15,17	4.370.000	15,17	anggaran untuk sub kegiatan ini sifalnya disediakan dan digunakan sesuai kebutuhan
	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		6.513.944.053	6.513.944.053	6.444.223.404	98,93	69.720.649	1,07	69.720.649	1,07	
	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu)		6.092.309.600	6.092.309.600	6.025.747.697	98,91	66.561.703	1,09	66.561.703	1,09	

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	NAMA PENANGGUNG JAWAB MASING-MASING KEGIATAN (PPK/PPPTK)	JUMLAH ANGGARAN	TARGET SAMPAI TRIWULAN IV (BERDASARKAN ANGGARAN KAS)	REALISASI ANGGARAN S.D 31 Desember 2022		SELISIH		TOTAL SISA ANGGARAN		PERMASALAHAN/ KENDAL A
					Rp	%	Rp	%	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7 = (6/5*100)	8=5-6	9=(8/5*100)	10=4-6	11=(10/4*100)	12
	Daerah Kabupaten/Kota										
	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Seleksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	YASRUDDIN, S. Sos	5.353.631.300	5.353.631.300	5.322.787.597	99,42	30.843.703	0,58	30.843.703	0,58	terdapat upahjasa yang mengundurkan diri
	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penerbitan dan Pengawasan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	YASRUDDIN, S. Sos	77.783.300	77.783.300	77.596.400	99,75	196.900	0,25	196.900	0,25	

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	NAMA PENANGGUNG JAWAB MASING-MASING KEGIATAN (PPK/PPPTK)	JUMLAH ANGGARAN	TARGET SAMPAI TRIWULAN IV (BERDASARKAN ANGGARAN KAS)	REALISASI ANGGARAN S.D 31 Desember 2022		SELISIH		TOTAL SISA ANGGARAN		PERMASALAHAN/KENDAL A
					Rp	%	Rp	%	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7 = (6/5*100)	8=5-6	9=(8/5*100)	10=4-6	11=(10/4*100)	12
	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenleraman dan Keleriban Umum serta Perindugan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	YASRUDDIN, S. Sos	61.940.000	61.940.000	61.885.100	99,91	54.900	0,09	54.900	0,09	
	Pemberdayaan Perindugan Masyarakat dalam rangka Ketenleraman dan Keleriban Umum	YASRUDDIN, S. Sos	80.570.000	80.570.000	79.627.750	98,83	942.250	1,17	942.250	1,17	
	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perindugan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bermuansa Hak Asasi Manusia	NI KADEK RINHA WATY, SE	278.270.000	278.270.000	267.175.100	96,01	11.094.900	3,99	11.094.900	3,99	realisasi honorarium narasumber dibayarkan sesuai tingkatan jabatan dan anggaran nya sifatnya

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	NAMA PENANGGUNG JAWAB MASING-MASING KEGIATAN (PPK/PPPTK)	JUMLAH ANGGARAN	TARGET SAMPAI TRIWULAN IV (BERDASARKAN ANGGARAN KAS)	REALISASI ANGGARAN S.D 31 Desember 2022		SELISIH		TOTAL SISA ANGGARAN		PERMASALAHAN/ KENDAL A
					Rp	%	Rp	%	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7 = (6/5*100)	8=5-6	9=(8/5*100)	10=4-6	11=(10/4*100)	12
											disediakan dengan standar jabatan pimpinan untuk mangantisi ipasi narasumber yang datang adalah Pimphan dari Instansi atau lembaga yang dikerjakan makan
	Kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan dan penanganan	NI KADEK RINHA WATY,SE	24.760.000	24.760.000	10.337.500	41,75	14.422.500	58,25	14.422.500	58,25	anggaran subkegiatan ini sifatnya disediakan

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	NAMA PENANGGUNG JAWAB MASING-MASING KEGIATAN (PPK/PPPTK)	JUMLAH ANGGARAN	TARGET SAMPAI TRIWULAN IV (BERDASARKAN ANGGARAN KAS)	REALISASI ANGGARAN S.D 31 Desember 2022		SELISIH		TOTAL SISA ANGGARAN		PERMASALAHAN/ KENDALA
					Rp	%	Rp	%	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7 = (6,5*100)	8=5-6	9=(8/5*100)	10=4-6	11=(10/4*100)	12
	gangguan kelenjaringan dan kelenjaringan umum										n bila terdapat lembaga yang akan melakukan kerjasama dengan Satpol PP dalam penanganan gangguan Trantibum
	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kelenjaringan Umum dan Kelenjaringan Masyarakat	NI KADEK RINHA WATY, SE	189.635.000	189.635.000	182.305.000	96,13	7.330.000	3,87	7.330.000	3,87	realisasi anggaran disesuaikan dengan harga dalam e-catalog atau nilai kontrak

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	NAMA PENANGGUNG JAWAB MASING-MASING KEGIATAN (PPK/PPPTK)	JUMLAH ANGGARAN	TARGET SAMPAI TRIWULAN IV (BERDASARKAN ANGGARAN KAS)	REALISASI ANGGARAN S.D 31 Desember 2022		SELISIH		TOTAL SISA ANGGARAN		PERMASALAHAN/ KENDAL A
					Rp	%	Rp	%	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7 = (6/5*100)	8=5-6	9=(8/5*100)	10=4-6	11=(10/4*100)	12
	Penyusunan SOP Keterlibatan Umum dan Ketenteraman Masyarakat	NI KADEK RINHA WATY,SE	18.060.000	18.060.000	16.585.000	91,89	1.465.000	8,11	1.465.000	8,11	terdapat belanja makan minum rapat melalui sistem pemesanan online-catalog yang mengharuskan penyedia dan pejabat pengadaaan harus selalu standby dan kendala jaringan yang membuat

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	NAMA PENANGGUNG JAWAB MASING-MASING KEGIATAN (PPK/PPTK)	JUMLAH ANGGARAN	TARGET SAMPAI TRIWULAN IV (BERDASARKAN ANGGARAN KAS)	REALISASI ANGGARAN S.D 31 Desember 2022		SELISIH		TOTAL SISA ANGGARAN		PERMASALAHAN/KENDALA
					Rp	%	Rp	%	Rp	%	A
1	2	3	4	5	6	7 = (6/5*100)	8=5-6	9=(8/5*100)	10=4-6	11=(10/4*100)	12
											sulit melakukan transaksi
	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	NIKADEK RINHA WATY SE	7.660.000	7.660.000	7.448.450	97,24	211.550	2,76	211.550	2,76	Anggaran Sub Kegiatan Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada sifatnya disediakan sebesar 2,5% dari

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	NAMA PENANGGUNG JAWAB MASING-MASING KEGIATAN (PPK/PPTK)	JUMLAH ANGGARAN	TARGET SAMPAI TRIWULAN IV (BERDASARKAN ANGGARAN KAS)	REALISASI ANGGARAN S.D 31 Desember 2022		SELISIH		TOTAL SISA ANGGARAN		PERMASALAHAN/ KENDALA
					Rp	%	Rp	%	Rp	%	A
1	2	3	4	5	6	7 = (6/5*100)	8=5-6	9=(8,5*100)	10=4-6	11=(10/4*100)	12
											biaya operasional di Penegakan Perda. Digunakan pada saat terjadi kerugian materiil dan cidera fisik akibat pelaksanaan an Penegakan Perda. Sub Kegiatan ini merupakan SPM.

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	NAMA PENANGGUNG JAWAB MASING-MASING KEGIATAN (PPK/PPPTK)	JUMLAH ANGGARAN	TARGET SAMPAI TRIWULAN IV (BERDASARKAN ANGGARAN KAS)	REALISASI ANGGARAN S.D 31 Desember 2022		SELISIH		TOTAL SISA ANGGARAN		PERMASALAHAN/ KENDAL A
					Rp	%	Rp	%	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7 = (6/5*100)	8=5-6	9=(8/5*100)	10=4-6	11=(10/4*100)	12
	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota		384.260.184	384.260.184	382.921.861	99,65	1.338.323	0,35	1.338.323	0,35	
	socialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	IBRAHIM YAKUB,S.Hut	91.929.000	91.929.000	91.765.950	99,82	163.050	0,18	163.050	0,18	
	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	IBRAHIM YAKUB,S.Hut	140.348.915	140.348.915	140.037.665	99,78	311.250	0,22	311.250	0,22	
	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	IBRAHIM YAKUB,S.Hut	151.982.269	151.982.269	151.118.246	99,43	864.023	0,57	864.023	0,57	

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	NAMA PENANGGUNG JAWAB MASING-MASING KEGIATAN (PPK/PPPTK)	JUMLAH ANGGARAN	TARGET SAMPAI TRIWULAN IV (BERDASARKAN ANGGARAN KAS)	REALISASI ANGGARAN S.D 31 Desember 2022		SELISIH		TOTAL SISA ANGGARAN		PERMASALAHAN/KENDAL A
					Rp	%	Rp	%	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7 = (6/5*100)	8=5-6	9=(8/5*100)	10=4-6	11=(10/4*100)	12
	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota		37.374.269	37.374.269	35.553.646	95,13	1.820.623	4,87	1.820.623	4,87	
	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	NI KADEK RINHA WATY,SE	12.074.299.907	37.374.269	35.553.646	95,13	1.820.623	4,87	1.820.623	4,87	terdapat belanja makan minum rapat melalui sistem pemesanan online katalog yang mengharuskan penyedia dan pejabat pengadaan harus selalu standby dan

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	NAMA PENANGGUNG JAWAB MASING-MASING KEGIATAN (PPK/PPPTK)	JUMLAH ANGGARAN	TARGET SAMPAI TRIWULAN IV (BERDASARKAN ANGGARAN KAS)	REALISASI ANGGARAN S.D 31 Desember 2022		SELISIH		TOTAL SISA ANGGARAN		PERMASALAHAN/ KENDALA A
	2	3	4	5	Rp	%	Rp	%	Rp	%	
1			4	5	6	7 = (8/5*100)	8=5-6	9=(8/5*100)	10=4-6	11=(10/4*100)	12
											kendala jaringan yang membuat sulit melakukan transaksi
	TOTAL BELANJA		12.074.299.907	12.074.299.907	11.911.575.265	98,65	162.724.642	1,35	162.724.642	1,35	

BAB IV

PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2022 ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perencanaan program kegiatan yang akan datang. Untuk mewujudkan tata pemerintahan dan tata kelola yang transparan dan akuntabel.

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan Satpol PP Kab Luwu Timur masih adanya kendala dan kekurangan yang perlu untuk diperbaiki dan penyesuaian dengan perkembangan dan situasi yang ada dalam masyarakat. Untuk itu diperlukan langkah-langkah strategik dimasa yang akan datang seperti :

- Penyempurnaan perencanaan kegiatan dan penyusunan jadwal kegiatan yang lebih matang serta menghindari adanya tumpang tindih antar kegiatan maupun program.
- Peningkatan kualitas sumber daya aparatur serta sarana dan prasarana, untuk mendukung pencapaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur.
- Peningkatan kerjasama dengan stakeholder lainnya serta dukungan masyarakat dalam mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum
- Peningkatan sosialisasi terhadap Perda dan Keputusan Bupati, ketenteraman dan ketertiban masyarakat secara berkesinambungan dan terus-menerus.

Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan kerja keras partisipasi, semangat, dan komitmen dari seluruh personil Satpol PP Kab. Luwu Timur, karena akan menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dimasa mendatang. Hasil kerja itu nantinya menjadi

cerminan sebagai tuntutan pembangunan yang memang dibutuhkan sesuai dengan visi dan misi yang ingin dicapai.

Demikianlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2022 ini disusun, sebagai wujud pertanggungjawaban peran serta Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur mendukung Visi dan Misi Kepala Daerah.

Malili, Januari 2023

Kepala Satuan



INDRA FAWZY, S.IP, M.Si.

Pangkat: Pembina Utama Muda

NIP. 19701103 199003 1 002